

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam mencermati proses pembangunan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015, melihat bahwa Desa selama ini hanya menjadi objek dalam kegiatan pembangunan, sementara arah kebijakan untuk mendukung pengembangan desa, sangat kecil. Olehnya itu dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, disusun perencanaan yang dikemas dalam bentuk Program “Nawacita”, dimana Pengembangan Desa menjadi 3 (Tiga) Skala Prioritas Utama yang mengangkat tema “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah tertinggal dan desa”

Mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan sesuai dengan bunyi Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Desa, dinyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembangunan di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Transfer ke Daerah berupa Dana Desa (DD). Olehnya itu menurut Resty Ditha Handayani (2023) bahwa stimulus yang diberikan kepada Desa adalah salah satu bentuk upaya dari pemerintah agar melalui pengelolaan desa secara otonomi akan dapat meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dipedesaan.

Harapan inilah menurut Hermina Bafa (2021) yang hendak dicapai oleh pemerintah, dimana desa tidak lagi hanya sekedar objek pada sebuah kegiatan pembangunan, namun perannya harus berubah menjadi Subjek dari Pembangunan itu sendiri, melalui pembangunan sarana dan prasarana sehingga menjadi jembatan dalam melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) yakni sebuah lembaga yang dibentuk serta dikelola secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa sebagai sumber usaha.

Peluang yang dimiliki oleh BUMDes dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Desa, dapat dikatakan sangat besar sebab hampir semua desa memiliki potens-potensi yang memiliki nilai ekonomis dan membutuhkan upaya secara sistematis untuk dapat dikembangkan. Olehnya itu Sihabudin (2021) menekankan bahwa setiap desa semestinya memiliki Badan Usaha sendiri, mengapa itu diperlukan agar semua potensi yang ada di desa dapat diberdayakan sehingga memiliki nilai ekonomis, dan tentunya melalui pengelolaan tersebut dampaknya akan bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Tatang (2023) dalam kajian penelitiannya mengemukakan bahwa Potensi Desa adalah semua bentuk sumber daya khususnya yang berasal dari alam seperti Tanah, Air dan Udara, begitupun dengan masyarakat, aparatur atau semua penduduk di desa yang

digolongkan sebagai sumber daya manusia, dimana kesemua itu dapat dianggap sebagai modal dasar bagi BUMDes untuk dikelola dan juga dikembangkan.

Cerita tentang kesuksesan yang diraih oleh BUMDes telah banyak di dengar, bahkan beberapa diantaranya telah menjadi sumber utama pendapatan desa melalui pemanfaatan potensi yang ada. Terdapat BUMDes yang mampu menjadikan Hutan Belantara menjadi sebuah objek Wisata, ada pula diantaranya mampu menjadikan lahan yang dulunya sangat tidak produktif menjadi lahan produktif bahkan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat desa, serta tidak sedikit BUMDes diberbagai daerah telah mampu membangun sarana pembelanjaan setingkat Alfamart atau Indomaret. Tentunya kondisi ini sangat tergantung dari inovasi dan kreatifitas dari masyarakat juga pemerintah dalam mengelola potensi yang dimiliki (bumdes, 2021).

Disisi lain juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pula BUMDes saat ini berjalan namun belum mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat desa, dan bahkan ada BUMDes yang tersisa hanya Plan Nama saja. Kondisi ini didasarkan pada Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Tahun 2022, bahwa dari 60.417 BUMDes yang telah terbentuk, 47.807 diantaranya mampu berjalan secara aktif dan bahkan dianggap telah memiliki kontribusi terhadap tingkat perekonomian di Desa dengan 156.851 bentuk unit usaha yang dijalankan. Sementara selebihnya dalam

kondisi pembenahan karena beberapa diantaranya tidak lagi aktif walaupun Plan BUMDes masih ada.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga masih banyak BUMDes dalam status tidak aktif saat ini menurut Darmin Bone Hasirun (2020) bukan dikarenakan oleh persoalan faktor permodalan, namun lebih dikarenakan BUMDes dalam menentukan usaha yang akan dikelola tidak didasari atas rancangan usaha yang berorientasi pada pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Desa, hal ini dapat dilihat bahwa BUMDes terkadang hanya melihat Trendnya sebuah usaha, akan tetapi tidak dipahami bahwa usaha yang trend tersebut belum tentu dapat dilakukan di desa mereka.

Menguatkan pandangan tersebut Sinta Rahmawati (2022) juga mengemukakan bahwa sebenarnya tidak berjalannya BUMDes bukan karena persoalan modal, sebab sangat jelas dalam berbagai kebijakan pemerintah bahwa salah satu tujuan dikucurkannya Dana Desa yakni mendukung usaha masyarakat melalui Pemberdayaan BUMDes, akan tetapi persoalan kegagalan tersebut dominan karena tidak mampunya pemerintah dan pengelola BUMDes mengoptimalkan potensi yang ada di desa, selain itu unsur lainnya karena dalam penentuan usaha tidak didasarkan pada pola analisis sehingga terkadang usaha yang dibentuk tidak didasarkan atas kebutuhan masyarakat.

Fenomena berbeda dikemukakan oleh Ika Fitriyani (2023) bahwa BUMDes terkadang telah membentuk usaha sesuai dengan

tingkat kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pemanfaatan Potensi di Desa, permasalahan yang ditemui adalah rasa memiliki dari masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan Usaha BUMDes dapat dikatakan rendah, hal ini dilihat dari upaya BUMDes dalam mendukung permodalan usaha masyarakat tidak disertai niat baik untuk melakukan pengembalian, sehingga modal yang mestinya bergulir akhirnya mandek dan tidak dapat dikembangkan untuk mendukung usaha BUMDes lainnya.

Sementara Nabila Sufah (2023) mengemukakan bahwa secara faktual saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab pengelolaan BUMDes tidak berjalan optimal lebih dominan disebabkan oleh beberapa hal seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya koordinasi antara pengurus dengan pemerintah desa terkait dengan anggaran, komunikasi antar pengurus dengan masyarakat yang kurang efektif, termasuk pula masalah kompetensi sumber daya manusia pengurus yang belum memadai, sosialisasi mengenai BUMDesa yang tidak menjangkau seluruh masyarakat Desa, serta belum adanya implikasi yang tampak dari program BUMDes karena programnya belum menyentuh seluruh masyarakat.

Berbagai gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi pada BUMDes, secara umum bukanlah pada persoalan tidak tersedianya Modal Kerja yang dapat dikelola, namun letaknya pada pola pengelolaan dan juga ketersediaan dan kompetensi dari

Sumber Daya Manusia dari Pengelola BUMDes. Sebab untuk masalah Modal Kerja BUMDes, sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Angka 6 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kondisi ini juga terjadi pada BUMDes Madalleng Desa Cemba Kabupaten Enrekang, dimana dari hasil observasi awal yang dilakukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMDes pada dasarnya terletak pada persoalan kelembagaan, sebab beberapa pengurus yang telah ditunjuk tidak lagi optimal dalam mengelola organisasi BUMDes, karena hasil wawancara dengan Kepala Desa diperoleh gambaran bahwa untuk permasalahan Modal, pihak dari Pemerintah bersama Lembaga-Lembaga yang ada di Desa Cemba secara terbuka bersedia untuk memberikan Modal Kerja kepada BUMDes sepanjang Usaha yang akan kelola jelas dan memiliki peluang bisnis cukup besar.

Keinginan dari pihak pemerintah Desa Cemba tersebut juga diuraikan oleh Kinasih (2020) dalam kajian penelitiannya bahwa sebagai sebuah lembaga yng dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat, maka keberadaan BUMDes di Desa selain bertujuan

untuk memperkuat perekonomian desa, tentunya diharapkan pula untuk mampu memanfaatkan dan mengelola potensi desa dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berimplikasi tingkat kesejahteraan masyarakat dan secara sendirinya akan bermuara pada meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes).

Ditambahkan pula dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Cemba bahwa keberadaan BUMDes Madalleng, sejak awal sebenarnya telah diformulasi untuk mengelola usaha yang dianggap potensial, namun permasalahannya persepsi potensial dalam pandangan Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes waktu itu tidak memberikan jaminan akan keberlangsungan usaha yang dikelola oleh BUMDes, sehingga berdasar pada beberapa bentuk sosialisasi yang telah diikuti terkait pengelolaan BUMDes, akhirnya diperoleh gambaran bahwa penyebab sehingga tingkat keberlanjutan usaha dari BUMDes rendah bahkan beberapa diantaranya dapat dikatakan macet karena tidak didasarkan atas analisis kebutuhan usaha, selain itu orientasi usaha yang dikelola belum berorientasi pada potensi desa hanya didasarkan pada Trend.

Mendukung pola pikir yang disampaikan oleh Kepala Desa Cemba, bahwa diantara sekian banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga usaha yang dikelola BUMDes tidak mampu berkembang karena tidak didasari atas analisis kebutuhan usaha, dimana kebutuhan modal kerja menjadi bagian dari analisis tersebut.

Hal ini ditegaskan dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Miftahul Z. Buhanga (2022) bahwa sebuah usaha agar dapat memiliki tingkat keberlanjutan tinggi, maka hal mendasar yang perlu dilakukan yakni menyusun perencanaan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan serta faktor-faktor yang dapat mengaruhi pengelolaan Modal Kerja.

Sementara menurut Sujarweni (2020) bahwa untuk memahami tentang modal kerja pada BUMDes akan sangat erat hubungannya dengan bagaimana menghitung modal yang dibutuhkan, olehnya itu dasar dari pengelola BUMDes untuk dapat menentukan Modal Kerja yang dibutuhkan tentunya harus mampu memahami secara utuh tentang sifat usaha, jangkauan sirkulasi produksinya dan bagaimana tingkat perputaran terhadap modal yang akan digunakan.

Berdasar pada pandangan dari Akhmad Syarifudin (2020) dan Aisyatun Nafisah (2023) bahwa untuk memahami tentang usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes, pada dasarnya tidaklah terlalu rumit sebab dalam beberapa aturan pemerintahan orientasinya sangat jelas yakni mengembangkan potensi yang ada di desa, dengan itu semua bentuk pemahaman tentang kebutuhan sebuah usaha akan dapat terpenuhi. Hanya saja permasalahan yang perlu disikapi adalah bagaimana usaha yang nantinya akan dikelola oleh BUMDes dapat bersinergi atau melibatkan secara utuh, sehingga keberlanjutannya dapat terjaga karena masyarakat memiliki keterikatan bagaimana membesarkan usaha yang dikelola oleh BUMDes.

Menyikapi berbagai fenomena terkait dengan pengelolaan BUMDes yang dituangkan dalam berbagai hasil kajian penelitian, kemudian mencermati tentang beberapa permasalahan pada BUMDes Madalleng Desa Cemba, dapat diketahui bahwa hal mendasar yang menjadi problematika pengelolaan usaha yang dikelola BUMDes selama ini sehingga tingkat keberlanjutannya rendah karena tidak didasari pada suatu bentuk analisis kebutuhan khususnya terkait dengan orientasi usaha yang belum berbasis potensi desa dan juga belum didasari analisis siklus usaha sebagai unsur yang dapat mempengaruhi jumlah modal yang dibutuhkan.

Sehingga berdasar pada gambaran tersebut, maka dalam penelitian ini fokus kajian akan diorientasikan untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan Modal BUMDes dengan orientasi usaha diprioritaskan pada pengembangan Potensi yang dimiliki oleh Desa, olehnya itu judul nantinya dijadikan acuan analisis terhadap maksud tersebut adalah : “Analisis Kebutuhan Modal BUMDes Madalleng Terhadap Pengembangan Potensi Desa Cemba Kabupaten Enrekang”

B. Fokus Penelitian

Fenomena yang terjadi pada BUMDes Madalleng Desa Cemba saat ini, dimana kinerja dari Lembaga ini dapat dikatakan tidak dapat berjalan maksimal, dimana penyebabnya selain beberapa pengurus lagi tidak aktif, hal mendasar yang juga menjadi problematikanya adalah usaha dari BUMDes belum didasari atas Analisis Kebutuhan

usaha, juga orientasi dari usaha yang dikembangkan belum berbasis pada potensi Desa. Sehingga untuk mengkaji tentang problematika tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji yakni :

1. Potensi Desa apa sajakah yang dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha oleh BUMDes Madalleng Desa Cemba Kabupaten Enrekang ?
2. Seberapa besar Modal Kerja yang dibutuhkan terhadap Potensi Desa yang dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha oleh BUMDes Madalleng Desa Cemba Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Potensi-Potensi yang dapat dikembangkan menjadi usaha oleh BUMDes Madalleng Desa Cemba Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui jumlah Modal yang dibutuhkan terhadap Potensi-Potensi yang dapat dikembangkan menjadi usaha oleh BUMDes Madalleng Desa Cemba Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan

gambaran tentang Potensi Desa yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha BUMDes dan Modal Kerja yang dibutuhkan.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu manajemen terkait dengan Pemanfaatan Potensi Desa menjadi usaha BUMDes dan Modal Kerja yang dibutuhkan dalam mendukung usaha tersebut.
- c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan terhadap penelitian-penelitian yang mengkaji tentang Pemanfaatan Potensi Desa menjadi usaha BUMDes dan Modal Kerja yang dibutuhkan

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya kepada Pemerintah Desa Cemba tentang jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes dengan memanfaatkan potensi di desa serta jumlah modal yang dibutuhkan.
- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan bagi semua Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Potensi Desa sebagai sarana Usaha BUMDes serta Metode Analisis terkait dengan Kebutuhan Modal yang dibutuhkan dalam mengelola usaha-usaha tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, selanjutnya pada ayat 2 juga menjelaskan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kemudian dalam ayat 3 di jelaskan pula bahwa usaha yang dikelola bergerak pada bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan

potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Keberadaan BUMDes sendiri dimaksudkan untuk menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap pada standar desa. Maksud tersebut pada dasarnya juga ditegaskan oleh Kinasih (2020) bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan,

Sementara menurut pandangan dari Hafiziah Nazira Putri (2022) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes merupakan suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi menghasilkan suatu produksi dalam rangka mendapatkan peningkatan keuangan desa

b. Dasar Pembentukan BUMDes

Dasar pembentukan BUMDes telah diatur secara tersendiri dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes, yang berbunyi :

- 1) BUMDes merupakan sebuah bentuk usaha yang dimiliki oleh desa, sehingga ciri utama kepemilikannya bersifat kolektif, dalam artian bahwa usaha kepemilikannya atas nama pemerintah desa dan masyarakat.
- 2) Kosep tata kelola BUMDes berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sebuah usaha koperasi dimana asas manfaat diperuntukkan pada semua pihak baik pengelola, masyarakat secara menyeluruh
- 3) Pembentukan sebuah BUMDes bersifat *inklusif, deliberatif dan partisipatoris* atau dapat diartikan bahwa dalam pembentukannya, tidak cukup dilakukan oleh unsur pemerintah saja namun keterlibatan masyarakat secara luas juga sangat dibutuhkan

Prinsip dasar Pembentukan BUMDes dipertegas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor Desa yang berbunyi :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

- 3) BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara filosofi yang menjadi dasar dalam pendirian BUMDes menurut Abd. Rahman (2020) terdiri dari :

- 1) BUMDes merupakan badan usaha akan tetap dalam pendiriannya bukan sekedar untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan, tetapi lebih dimaksudkan untuk pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa.
- 2) BUMDes secara substatif tidak akan dan bermaksud mengambil alih kegiatan ekonomi yang sudah dan sedang dijalankan oleh masyarakat, akan tetapi diorientasikan untuk menciptakan hal-hal baru agar dapat menjadi nilai tambah dan sekaligus mensinergikan usaha tersebut dengan aktivitas ekonomi yang sudah ada dan terlebih dahulu dijalankan oleh masyarakat.
- 3) BUMDes sebagai *Social Enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang berdiri sendiri dan diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dengan cara mewujudkan nilai tambah (*Creating Value*), mengelola aset dan potensi (*Managing Value*), dan memberikan manfaat bagi masyarakat (*Distributing Value*).

- 4) BUMDes adalah hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Meskipun dibentuk oleh desa dan sebagian besar hingga keseluruhan modalnya milik desa, namun pengurus BUMDes memiliki teritorial tersendiri yang bersifat otonom.

c. Tujuan Pembentukan BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun secara teknis untuk tujuan pendirian BUMDes dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, bahwa tujuan dari pembentukan BUMDes yakni :

- 1) Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 3) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- 4) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

- 5) Membuka lapangan kerja.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan, dan pemerataan ekonomi desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.
- 8) Perekonomian pedesaan dengan model BUMDes, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

d. Fungsi BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1, bahwa fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan serta potensi Sumber Daya Alam dan Manusia, selain itu, diharapkan pula menjalankan fungsi sebagai:

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Sekaligus menjadi lembaga yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran

- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan PADes.
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

e. Ciri Khas BUMDes

Aisyatun Nafisah (2023) menjelaskan bahwa BUMDes dalam proses pendiriannya memiliki 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan masyarakat dimana pengelolaannya dilaksanakan secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal;
- 3) Oprasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa;
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah,;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

f. Typologi BUMDes

BUMDes sesuai dengan Typologinya menurut Hasanah Dkk, (2021) dapat diklasifikasi menjadi 5 kategori yaitu

- 1) BUMDes Rintisan (*Start Up*) Artinya setiap desa yang mempunyai BUMDes. Mengelola beberapa unit usaha pastinya masih mencari model kerja per unit usaha yang ada, serta pembagian tugas di masing pengurusnya.
- 2) Tumbuh (*Growth*) dimana BUMDes yang ada berbicara untung rugi dari modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa, karena ketika BUMDes menerima modal artinya ada laporan yang diberikan kepada Pemerintah Desa
- 3) Matang (*Mature*) Artinya mulai menemukan rule kerja unit usaha BUMDEs. Mendapatkan keuntungan yang nantinya dibagi dengan dengan Pemerintah Desa sesuai yang ada di Perdes (Peraturan Desa) tentang BUMDEs
- 4) Maju (*Take off*) artinya BUMDes sudah menemukan rule model kinerja yang paten, sehingga bisa mengambil pekerja dari lokal desa, sebagai kebermanfaatan adanya BUMDesa untuk masyarakat
- 5) Besar (*Enterprise*) dinyatakan dalam Perdes menyebutkan keuntungan antara BUMDes dan Pemerintah Desa sehingga masuk PAD (Pendapatan Asli Desa), untuk dikembalikan kepada masyarakat

g. Jenis-Jenis Usaha BUMDes

Abdul Rahmad Suleman (2020) mengemukakan bahwa BUMDes sebagai salah satu lembaga perekonomian desa, merupakan motor penggerak untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes mempunyai banyak pilihan untuk dijadikan sebagai usahanya yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Produk-produk yang dimiliki juga harus memiliki kelebihan agar tujuan BUMDes dapat tercapai sebagai usaha yang menyejahterakan masyarakat desa. Adapun jenis usaha dan bisnis yang bisa dilakukan oleh BUMDes antara lain :

- 1) Usaha Sosial yaitu usaha yang sangat sederhana dan bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan.

Contohnya dari usaha ini yaitu listrik desa, lumbung, pangan, pengelolaan air minum, dan usaha lain yang berkaitan dengan sumber daya lokal.

- 2) Usaha Penyewaan (*Renting*), dalam usaha penyewaan ini bersifat melayani kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan.

Contoh : penyewaan alat transportasi, penyewaan alat bangunan penyewaan ruko, dan masih banyak lainnya.

- 3) Usaha Perantara (*Brokering*), pihak BUMDes bisa menjadi perantara atau memberikan jasa layanan pemasaran agar masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produknya. Peran BUMDes dalam hal ini memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat apakah itu sifatnya produk dari *Home Idustry*, produk pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan, atau usaha lain dari masyarakat.
- 4) Usaha Bersama (*Bolding*), dalam usaha bersama ini BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat.

Misalnya, Pengelolaan destinasi wisata yang ada di desa kemudian dapat membuka akses bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran dalam usaha tersebut.
- 5) Kontraktor (*Ccontracting*), dalam jenis ini BUMDes bisa menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas desa, misalnya pelaksanaan proyek desa, pemasok bahan dan material pada proyek desa.
- 6) Keuangan (*Banking*), BUMDes juga bisa menjalankan lembaga keuangan untuk membantu warganya dalam mendapat akses finansial dengan cara yang cukup mudah dan bunga yang rendah, selain itu dapat mendorong produktivitas usaha yang dimiliki desa dari segi permodalan.

h. Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes

Sujarweni (2020) menguraikan bahwa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dimana terhadap Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenan dengan hal itu maka untuk pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa dengan berpedoman pada 6 (Enam) prinsip yaitu :

- 1) *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes
- 3) *Emansipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memadang golongan, suku dan agama.
- 4) *Transparan*, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5) *Akuntabel*, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

6) *Sustainabel*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

Prinsip-prinsip dasar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut pada dasarnya mengacu pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2021, yang terdiri dari :

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan bisnis, BUMDes harus menyediakan informasi dalam bentuk material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

BUMDes harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu BUMDes harus dikelola secara benar,

terukur dan sesuai kepentingan usaha dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3) **Responsibilitas (Responsibility)**

BUMDes harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara secara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4) **Independensi (*Independency*)**

Melancarkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), BUMDes harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

BUMDes dalam melaksanakan kegiatan, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

2. Modal Usaha BUMDes

a. Pengertian Modal Usaha

Modal Usaha menurut pandangan dari Ismi Dwi Kurniasih (2021) dapat berupa uang atau non-uang yang

dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis, sementara dari sisi perusahaan bahwa modal dapat berupa dana tunai atau dalam bentuk bangunan, mesin ataupun perlengkapan. Bentuk-bentuk modal jika dilihat dari sumbernya ada yang datang dari milik sendiri, tetapi ada juga yang diberikan oleh pihak lain.

Modal merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk menjalankan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas lainnya. Tanpa modal yang bersifat tunai, maka sebuah perusahaan dapat berjalan, namun aktivitasnya terbatas, sehingga berdasarkan sering kali bentuk modal juga disebut dengan Modal Usaha.

Rama Yana (2023) menyatakan bahwa modal yang digunakan dalam menopang kinerja sebuah usaha atau sering disebut dengan Modal Usaha adalah Dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari atau dapat pula dikatakan bahwa Modal Usaha merupakan seluruh aktiva lancar oleh perusahaan ataupun bisa juga diartikan selaku biaya yang wajib disediakan dalam membayar ataupun mendanai operasional yang dijalankan perusahaan.

Sementara dari sudut pandang sitem manajemen, menurut Jenita dan Herispon, (2022) bahwa modal dapat dimaknai sebagai salah satu sumber daya terpenting yang

harus dimiliki oleh sebuah usaha untuk menjaga solvabilitas, dan sifatnya merupakan bagian dari sumber daya keuangan yang siap pakai untuk menyerap atau menangani kerugian. Peran penting lainnya dari modal adalah meningkatkan siklus pertumbuhan usaha.

b. Konsep Modal Usaha

Konsep Modal Usaha secara terminologi dapat diuraikan atas 3 (Tiga), dimana menurut Maharani (2020) bahwa makna secara Konseptual untuk Modal Usaha yakni :

1) Modal Usaha dari segi Konsep Kuantitatif

Modal Usaha dari sudut pandang konsep ini dititik beratkan pada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukan dana (*fund*) yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa Modal Usaha adalah Jumlah Aktiva Lancar (*Gross Working Capital*)

2) Modal Usaha dari segi Konsep Kualitatif

Memaknai Modal Usaha berdasarkan Konsep Kualitatif, dimana sudut pandangnya dititik beratkan pada kualitas modal yang akan digunakan. Dalam konsep ini pengertian Modal Usaha adalah kelebihan Aktiva Lancar (*Gross Working Capital*) terhadap Hutang Jangka Pendek (*Net*

Working Capital), yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan.

3) Modal Usaha dari segi Konsep Fungsional

Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana (Modal Usaha) yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan (laba) dari produk pokok unit usaha. Pada dasarnya dana-dana yang dimiliki oleh suatu unit usaha seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok unit usaha, tetapi tidak semua dana digunakan. Modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap unit usaha sehari-hari dan secara konsep memiliki nilai fungsional yakni pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar hutang, dan pembayaran lainnya;

c. Sumber Modal Usaha

Modal Usaha berdasarkan pada sumbernya menurut Harahap (2020) terdiri dari :

1) Internal Usaha (*Internal Sources*).

Modal yang dihasilkan dari usaha yang dikelola oleh perusahaan. Sumber internal dapat berasal dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Besarnya laba yang dimasukkan ke dalam cadangan atau ditahan, tergantung

besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu dan tergantung pada kebijakan dividen perusahaan tersebut. Sedangkan akumulasi penyusutan dapat dibentuk dari penyusutan tiap tahunnya, namun hal ini juga tergantung metode penyusutan yang digunakan.

Miftahul Zannah Buhanga (2022) mengemukakan bahwa Modal yang berasal dari Internal terdiri dari

2) Bersumber dari Luar Perusahaan (*External Sources*)

Modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur atau pemegang saham yang merupakan bagian dalam perusahaan. Sementara Agus (2020) menyatakan bahwa Modal Eksternal adalah Modal yang didapatkan dari luar bukan dari kekayaan Usaha. Modal eksternal sangatlah dibutuhkan untuk menambah jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan guna memperlancar kebutuhan perusahaannya

d. Jenis-Jenis Modal Usaha

Jenis-jenis Modal Usaha menurut Ermaini, dkk (2001) dapat digolongkan kedalam dua jenis yaitu :

1) Modal Usaha Permanen (*Permanent Working Capital*)

Permanent Working Capital (PWC) atau Modal Usaha yang bersifat permanen atau tetap adalah Modal Usaha yang wajib tersedia dalam suatu usaha atau lembaga agar

fungainya dapat berjalan dengan lancar. *Permanent Working Capital* (PWC) merupakan Modal Usaha wajib karena sifatnya secara kontinyu akan diperlukan untuk mendukung lancarnya kegiatan usaha. Modal Usaha permanen dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a) Modal Usaha Primer (*Primary Working Capital*) yaitu jumlah Aktiva Lancar (*Current Assets*) minimum yang harus dipertahankan unit usaha agar kontinyuitas operasi unit usaha terjamin.
- b) Modal Usaha Normal (*Normal Working Capital*) yaitu Modal Usaha yang jumlahnya sesuai dengan luas produksi normal.

2) Modal Usaha Variabel (*Variabel Working Capital*)

Variabel Working Capital adalah Total Modal Usaha yang memiliki jumlah tak menentu berdasarkan berubahnya kondisi, atau dapat pula dimaknai sebagai bentuk Modal Usaha yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan luas usaha produksi.

Modal Usaha Variabel (*Variabel Working Capital*) dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a) Modal Usaha Musiman (*Seasonal Working Capital*)
Seasonal Working Capital adalah kebutuhan Modal Usaha yang akan berubah-ubah disebabkan karena

fluktuasi musim. Misalnya kebutuhan Modal Usaha akan lebih besar menjelang lebaran, tahun baru dan sebagainya.

b) Modal Usaha Siklus Konjungtor (*Cyclical Working Capital*)

Cyclical Working Capital) dapat diisyaratkan dimana jumlah Modal Usaha akan berubah akibat adanya pengaruh konjungtor atau perubahan yang terjadi oleh kondisi perekonomian nasional.

c) Modal Usaha Darurat (*Emergency Working Capital*)

Bentuk Modal Usaha yang harus disediakan untuk menghadapi keadaan darurat misalnya bencana alam, peraturan pemerintah baru, bahan baku terlambat datang, dan sebagainya.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal

Faktor-faktor yang mempengaruhi modal menurut Nurul Fajrianti (2020) terdiri dari :

1) Sifat atau Jenis Usaha

Modal Usaha dari suatu usaha jasa relatif akan lebih rendah dari pada kebutuhan Modal Usaha usaha industri.

Unit usaha jasa biasanya menginvestasikan sebagian besar modal-modalnya pada aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan pelayanan kepada masyarakat.

Sebaliknya unit usaha industri harus mengadakan investasi yang cukup besar dalam aktiva lancar unit usaha karena usaha industri harus mengadakan investasi yang cukup besar dalam aktiva lancar agar perusahaannya tidak mengalami kesulitan di dalam operasinya sehari-hari. Bahkan diantara usaha yang bergerak dibidang industri kebutuhan Modal Usahanya tidak sama, usaha yang memproduksi barang akan membutuhkan Modal Usaha lebih besar dibandingkan usaha perdagangan atau usaha eceran, karena usaha yang memproduksi barang harus mengadakan investasi yang relatif besar untuk bahan baku, proses dan persediaan barang jadi.

2) Syarat Kredit dan Penjualan

a) Syarat Penjualan

Menghindari tingkat kebutuhan Modal yang cukup besar, maka setiap usaha semestinya menghindari penjualan dengan model kredit, karena semakin lunak kredit yang diberikan kepada pelanggan, maka tingkat kebutuhan modal akan semakin besar.

Mengoptimalkan tersedianya Modal yang bersifat tunai maka disarankan penjualan dilakukan dengan model pemotongan harga, sebab dengan model ini akan meningkatkan minat pembeli. Sehingga

ketersediaan dana segar atau Modal dalam bentuk tunai selalu terjaga pada setiap unit usaha.

b) Syarat Kredit

Apabila sebuah perusahaan dalam pembelian bahan baku atau produk dapat melakukan secara kredit yang sifatnya lunak, maka kondisi ini juga akan mengurangi penyediaan Modal Usaha cukup besar.

3) Level Perputaran Persediaan

Semakin tinggi *Inventory Turn-Over* (Level Perputaran Persediaan) barang persediaan (Dijual kemudian Diganti Kembali) maka jumlah Modal Usaha yang dibutuhkan unit usaha akan semakin rendah.

Sehingga pengendalian yang efektif diperlukan untuk memelihara jumlah, jenis dan kualitas barang yang sesuai dan untuk mengatur investasi dalam persediaan. Lebih cepat persediaan berputar, maka lebih sedikit resiko kerugian karena persediaan tersebut dapat berakibat pada terjadinya perubahan permintaan atau perubahan modal.

4) Waktu Produksi

Waktu yang dibutuhkan melakukan sebuah fase produksi akan sangat tergantung pada ketersediaan bahan atau atau produk, sehingga untuk kebutuhan Modal Usaha akan dapat dipengaruhi pada kondisi dari masa produksi

dan ketersediaan bahan pendukung atau produk dari sebuah kegiatan produksi, artinya semakin lama waktu tunggu dalam memperoleh bahan pendukung atau produk, maka tingkat kebutuhan modal juga lebih besar

5) Harga Pokok Persatuan Barang

Disamping itu harga pokok persatuan barang juga akan mempengaruhi besar kecilnya Modal Usaha yang dibutuhkan, semakin besar harga pokok persatuan barang yang dijual akan semakin besar pula kebutuhan akan Modal Usaha.

f. Konsep dan Jenis Modal Usaha pada BUMDes

Modal secara terminology jika dihubungkan dengan pengelolaan BUMDes menurut Muhammad Nashih Ulwan (2022) selain merujuk pada persepsi tentang pengertian Modal secara umum, namun secara spesifik konsep modal yang dipedomani dari prinsip-prinsip Pendirian BUMDes terdiri dari Modal Sosial, Modal Budaya dan Modal Ekonomi.

Penjelasan secara konseptual terhadap modal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Konsep Modal Sosial

Modal Sosial dalam konsep pengelolaan BUMDes merujuk pada jaringan hubungan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan atau tradisi yang ada dalam suatu komunitas

masyarakat disuatu daerah, dan tentunya konsep ini dapat berbeda sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat.

2) Modal Budaya

Konsep Modal jika dikaitkan dengan Budaya, lebih diorientasikan pada Nilai-Nilai Budaya atau Kepercayaan dari sekelompok masyarakat yang dapat memiliki potensi untuk dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis.

3) Konsep Ekonomi

Konsep Modal ini merujuk pada pola pemanfaatan semua sumber daya yang ada pada sebuah entitas, sehingga nantinya dapat memiliki nilai ekonomis, seperti potensi Sumber Daya dan Manusia di suatu wilayah.

Berpedoman pada ciri utama dari BUMDes sebagai Lembaga Perekonomian di Desa, maka sumber modalnya menurut Aisyatun Nafisah (2023) selain didasarkan pada sumber modal secara umum, juga terdapat sumber lain yang dapat digolongkan ke dalam 2 (Dua) jenis yakni :

- 1) Modal *Tangible* adalah modal yang berwujud secara nyata, baik dalam bentuk barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Modal ini sering dihubungkan dengan keberadaan dari semua bentuk potensi yang ada di desa baik itu sumber daya alam maupun manusia.

- 2) Modal *Intangible* adalah modal lainnya yakni dalam bentuk tidak berwujud, dan disesuaikan dengan kondisi di desa, makan ide atau gagasan yang berasal dari masyarakat juga dikategorikan sebagai bagian dari Modal BUMDes.

3. Analisis Kebutuhan Modal

a. Pengertian Analisis Kebutuhan Modal

Analisis Kebutuhan Modal menurut Aminuddin (2022) merupakan suatu metode analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal suatu usaha. Sementara menurut Ermaini (2021) Analisis Kebutuhan Modal adalah alat analisis finansial yang sangat penting bagi pengelola keuangan dalam suatu usaha, karena dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dapat dibutuhkan atau digunakan dan bagaimana kebutuhan tersebut dibelanjai.

Analisis Kebutuhan Modal menurut Dwipayanti (2020) adalah analisa untuk mengetahui sumber serta penggunaan modal atau mengetahui sebab-sebab berubahnya modal dalam periode tertentu. Dijelaskan pula bahwa dengan adanya Analisis Kebutuhan Modal maka perusahaan dianggap telah memiliki kemampuan dalam menentukan berapa besar jumlah modal yang dibutuhkan, dengan demikian perusahaan juga telah mengetahui jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk

membiayai kegiatan rutin pada tahun berikutnya, sehingga modal digunakan secara efektif.

Analisis Kebutuhan Modal merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber modal yang dapat mendukung operasional usaha. Olehnya itu menurut Harahap (2020) bahwa Analisis Kebutuhan Modal adalah sebuah bentuk analisis berisikan tentang metrik keuangan tentang jumlah sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menutupi biaya siklus produksi, biaya operasional yang akan datang, dan pembayaran utang, atau dengan kata lain, analisis ini menunjukkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membiayai kesenjangan antara pembayaran kepada pemasok dan pembayaran dari pelanggan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Modal

Besarnya kebutuhan modal untuk suatu periode menurut Miftahul Zannah Buhanga (2022) perlu dihitung oleh pengelola atau pelaku usaha, tujuannya agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan modal yang tidak perlu. Lebih dari itu dengan diketahuinya besarnya kebutuhan modal akan memudahkan pengelola untuk dapat menjalankan usahanya, meskipun dalam praktiknya sering kali perhitungan yang dilakukan tidak tepat mengingat berubahnya berbagai kondisi dan situasi baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Sujarweni (2020) menguraikan bahwa faktor-faktor yang sering mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan terhadap kebutuhan modal antara lain :

- 1) Periode perputaran modal, merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit, lamanya barang jadi disimpan dan jangka waktu penerimaan piutang.
- 2) Pengeluaran kas rata-rata setiap hari, merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh dan biaya-biaya lainnya.

Sementara menurut Nurul Fajrianti (2020) bahwa faktor-faktor yang banyak mempengaruhi kebutuhan modal sesuai kondisi kenyataan yang terjadi diakibatkan oleh dua hal yakni :

- 1) Besar Kecilnya Operasi Penjualan, artinya makin besar operasi penjualan yang akan dilakukan, maka kebutuhan modal juga makin besar, demikian pula sebaliknya apabila sehingga perencanaan usaha yang akan dijalankan oleh entitas usaha menjadi sangat penting, agar kebutuhan modal dapat dihitung secara cermat.
- 2) Kecepatan Perputaran Modal, artinya makin cepat modal berputar maka kebutuhan akan modal awal juga relatif besar, demikian pula sebaliknya

c. Perhitungan Kebutuhan Modal

Merumuskan dari berbagai pendapat terkait dengan metode perhitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kebutuhan modal khususnya dalam pengelolaan BUMDes, dari berbagai rujukan yang dicermati maka pola atau metode yang dianggap dapat digunakan untuk dapat menghitung Modal yang diperlukan dalam pengelolaan setiap usaha, maka persamaan yang digunakan merujuk pada pandangan dari Sujarweni (2020) yakni :

$$\text{Modal Awal} = MI + MK + MO$$

Dimana

MI = Modal Investasi adalah dana yang dibelanjakan untuk keperluan alat usaha yang digunakan sebagai penunjang kegiatan bisnis perusahaan

MK = **Modal Usaha** adalah seluruh biaya yang diperlukan perusahaan guna memenuhi kebutuhan bahan baku serta alat-alat pengembangan usaha.

MO = **Modal Operasional** adalah seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan.

Terdapat pula model persamaan lain yang dapat digunakan untuk menghitung modal awal usaha yakni

$$\text{Modal Awal} = MCE + MOE$$

Dimana

MCE = **Modal Capital Expenses** adalah modal yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan bisnis perusahaan. Termasuk di antaranya

adalah peralatan-peralatan yang digunakan dalam jangka waktu lama.

MOE = **Modal Operational Expenses** adalah modal awal yang dimanfaatkan untuk kepentingan operasional suatu perusahaan. Hal-hal yang termasuk operating expenses yaitu biaya sewa gedung, gaji karyawan, biaya telepon, listrik, dan lainnya.

4. Potensi Desa

a. Pengertian Potensi Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa, menjelaskan bahwa potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada penjelasan tersebut maka menurut Icuik R. B (2019) yang dimaksud dengan potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Desa baik itu berasal dari alam dan manusia, dimana sumber daya tersebut dapat dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh penduduk setempat. untuk menunjang kelangsungan hidup.

Sementara oleh Pardosi (2022) melihat Potensi Desa dari sudut pandang nilai ekonomi, sehingga didalam kajian penelitiannya mengemukakan bahwa Potensi Desa dapat

dimaknai melalui kata potensi yakni sebuah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang kemungkinan dapat untuk dikembangkan. Sehingga Potensi Desa dapat diartikan dengan semua bentuk sumber daya baik itu sumber daya alam maupun manusia yang memiliki ekonomi dimana semua bentuk sumber daya tersebut memungkinkan dan layak dikembangkan menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Mendukung pandangan tersebut oleh Tatik Mulyati, dkk (2022) juga melihat bahwa Potensi yang dimiliki oleh Desa jika dihubungkan dengan kegiatan bidang ekonomi memiliki arti sesuatu yang dapat dikembangkan atau dapat ditingkatkan pemanfaatan nilainya. Olehnya itu menggali nilai manfaat dari sumber daya di Desa lebih mengarah kepada kegiatan ekonomi. Untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas atau kegiatan dalam bentuk ekonomi yang bisa menggali dan meningkatkan pemanfaatannya untuk menunjang berjalannya roda perekonomian di desa.

b. Macam-Macam Potensi Desa

Potensi desa berdasarkan makna yang dikemukakan oleh menurut Lexy F Malani (2021) mengemukakan bahwa

Potensi Desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan atau kemampuan yang dimiliki oleh desa dan mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sementara Icuk R. B (2019) mengemukakan bahwa potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang berbentuk fisik dan non fisik. berdasar penggolongan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1) Potensi Fisik

Potensi Desa yang bersifat fisik menurut Icuk R. B (2019) terdiri dari : tanah, air, manusia, cuaca serta iklim dan ternak, sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa Potensi Desa yang bersifat fisik meliputi semua sumber daya alam yang ada disebuah desa, meliputi :

- a) Lahan, dimana yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya untuk wadah tumbuh tanaman, tetapi juga yang digunakan sebagai asal bahan tambang dan mineral.
- b) Tanah, cakupan secara fisik bukan hanya yang nampak namun juga dikaitkan dengan kesuburan, kekayaan alam yang tumbuh diatasnya, dan juga lokasi untuk bahan tambang atau mineral.
- c) Air, digunakan oleh tiap-tiap makhluk hidup untuk memperkuat hidup dan untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Umumnya desa mempunyai potensi air

yang bersih dan melimpah ruah. Air didalam tanah diperoleh dari penimbaan, pemompaan, atau mata air, yang berguna untuk kebutuhan kehidupan manusia.

- d) Manusia, dalam perspektif ini diartikan sebagai tenaga kerja yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola semua bentuk potensi di desa, sehingga dalam hal manusia merupakan potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah.

Peran penting dari manusia juga dikarenakan memiliki tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup sebagai faktor penentu dalam pembangunan desa.

- e) Cuaca atau Iklim, juga mempunyai kedudukan yang penting.

Cuaca atau Iklim sangat erat hubungannya dengan suhu dan curah hujan yang mempengaruhi disetiap daerah. Pada ketinggian tertentu dimana kategori sangat dingin belum tentu tidak produktif mungkin dapat menjadi maju karena banyak tanaman memiliki kecocokan iklim atau suhu yang bersifat sejuk. Begitupun pada kondisi iklim atau cuaca Panas dan Sedang, juga dimungkinkan terdapat komoditas tanaman atau sumber daya yang cocok untuk dikembangkan

- f) Hewan, dimana golongan yang umum dijadikan sebagai Potensi yakni jenis Hewan yang dapat ditenakkan, sebab selain sebagai sumber gizi juga memiliki nilai ekonomis lainnya.

2) Potensi Non Fisik

Icuk R. B (2019) mengemukakan bahwa potensi non fisik adalah segala potensi yang berbentuk sumber daya sosial atau berhubungan dengan pola perilaku masyarakat. Potensi non fisik lainnya yaitu lembaga desa, adat istiadat dan budaya, dimana masyarakat suatu kelompok memiliki tata kehidupan tersendiri.

Sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa potensi non fisik, meliputi :

- a) Masyarakat Desa yang hidup dengan bergotong-royong merupakan kekuatan produksi dan pondasi yang solid untuk mendukung kelangsungan rencana pembangunan desa.
- b) Aparatur Desa atau Pamong Desa yang berusaha secara maksimal untuk menjadi sumber ketertiban,. Aparatur yang jujur, disiplin, dan kreatif merupakan motor penggerak pembangunan di desa.
- c) Lembaga sosial desa digunakan sebagai cambuk keikutsertaan warga desa dalam pembangunan desa

c. Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Potensi Desa jika dihubungkan dengan pengembangan ekonomi desa oleh Ansahar (2023) mengemukakan bahwa pengembangan potensi desa jika dihubungkan dengan bidang ekonomi memiliki tujuan yakni menggali nilai manfaat sumber daya alam yang lebih mengarah kepada kegiatan bentuk ekonomi, sehingga untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas dalam berbagai bentuk kegiatan dan disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki.

Olehnya itu secara umum Akhmad Syarifudin (2020) mengemukakan bahwa tujuan pengembangan potensi desa adalah mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah :

- 1) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
- 2) Mengembangkan kemampuan dan peluang berusaha demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga khususnya yang berpenghasilan rendah.
- 3) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran BUMDes sebagai salah satu Lembaga Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat. Yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- 4) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan kepada BUMDes terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
- 5) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa.
- 6) Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap Analisis Kebutuhan Modal BUMDes Madalleng Terhadap Pengembangan Potensi Desa Cemba Kabupaten Enrekang, yakni :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/ Judul Penelitian/ Variabel/ Temuan Penelitian	Uraian
1	<i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i> <i>Variabel Penelitian</i> <i>Hasil Penelitian</i>	Aminuddin, Evi Malia, Hanafi, Nailah Aka Kusuma 2022 <i>Pengaruh Besaran Modal Awal Terhadap Eksistensi BUMDes di Kabupaten Sumenep</i> <i>Besaran Modal Awal, Eksistensi, BUMDes</i> Modal Usaha pada BUMDes dapat dikatakan memiliki pengaruh, namun perannya menjadi tidak signifikan sebab terdapat variabel lain yang dianggap memiliki peran besar untuk dapat mendukung agar Modal yang disediakan untuk pengelolaan usaha pada BUMDes memiliki

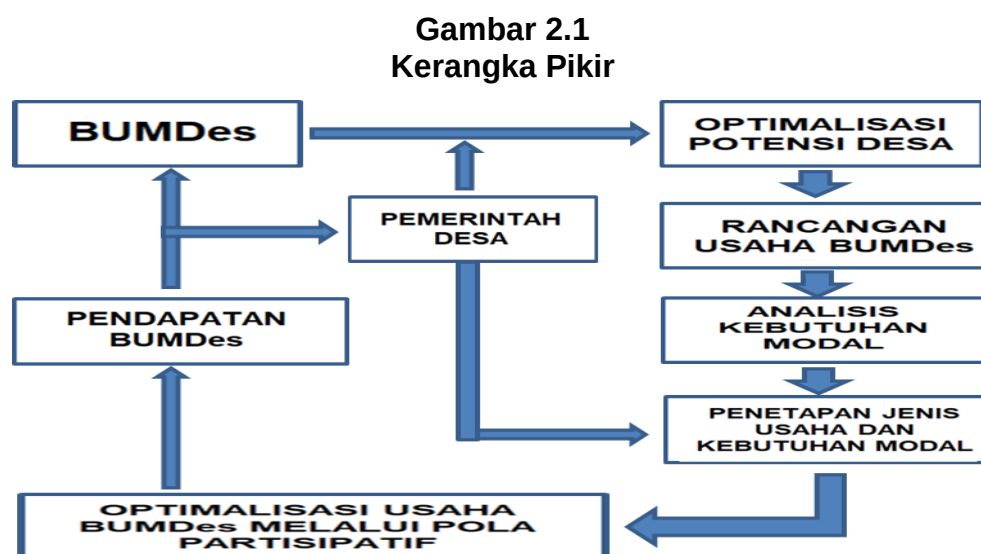
		dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa selain itu dapat pula meningkatkan penghasilan Desa.
2	Penulis Tahun Penelitian Penulis Tahun Penelitian Judul Penelitian	Nurul Fajrianti 2020 <i>Analisis Kebutuhan Modal Usaha Terhadap Laba Usaha Pada BUMDes Mattuju Di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan</i> <i>Analisis Kebutuhan, Modal Usaha, Laba Usaha, BUMDes</i> Tingkat Kebutuhan Modal Usaha BUMDes selalu disesuaikan dengan Perkembangan Usaha yang dikelola, demikian pula terhadap usaha yang akan dikembangkan maka Modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan jenis usaha dan produk yang akan dihasilkan.
3	Penulis Tahun Penelitian Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian	Ismi Dwi Kurniasih 2021 <i>Pengaruh Modal Dan Omset Terhadap Pendapatan BUMDesa Di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap</i> <i>Modal, Omset, Pendapatan, BUMDesa</i> Modal berpengaruh terhadap pendapatan BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa Modal merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh BUMDes, sebab setiap penambahan modal akan dapat meningkatkan pendapatan,
4	Penulis Tahun Penelitian Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian	Rama Yana 2023 <i>Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan BUMDes Sumber Rezeki Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Syariah</i> <i>Modal, Tenaga Kerja, Pendapatan. BUMDes</i> Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan usaha BUMDes, semakin besar modal yang diinvestasikan maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perputaran modal usaha yang dikelola
5	Penulis Tahun Penelitian Judul Penelitian	Desiwantara, Khasan Effendy, Udaya Madjid, Megandaru W. Kawuryan 2021 <i>Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>

	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Model, Pengelolaan BUMDes Pendapatan Asli Desa</i>
	<i>Hasil Penelitian</i>	Strategi BUMDes dalam meningkatkan PADes melalui <i>Strategi Capital Partisipation of Community</i> yang menitik beratkan pada dukungan Modal Sosial namun hal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peningkatan evaluasi <i>budgeting, accounting, performance management dan auditing</i> . Model ini menekankan pada partisipasi masyarakat desa dalam peranserta peningkatan permodalan BUMDes. Apabila peran serta masyarakat mampu tercipta dan terbentuk secara baik maka akan memudahkan perkembangan usaha yang dilakukan dan berdampak pada tingkat keuntungan Badan Usaha Milik Desa yang juga merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6	<i>Penulis</i>	Ika Fitriyani, Muhammad Nur Fietroh
	<i>Tahun Penelitian</i>	2023
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Keberadaan BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>BUMDes, Penggerak Ekonomi Masyarakat</i>
	<i>Hasil Penelitian</i>	Modal yang dimiliki oleh BUMDes lebih difokuskan pada Pendampingan Usaha Masyarakat terhadap Pengembangan Potensi Desa melalui Pola Pinjaman Lunak. Pola ini dianggap belum optimal karena tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pengembalian pinjaman sangat rendah, sehingga menjadi salah satu penghambat berputarnya modal BUMDes.
7	<i>Penulis</i>	Miftahul Zannah Buhanga, Rio Monoarfan, Lukman Pakaya
	<i>Tahun Penelitian</i>	2022
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Analisis Modal Usaha dalam Peningkatan Laba Usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bolugo di Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Modal Usaha, Peningkatan Laba Usaha, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</i>
	<i>Hasil Penelitian</i>	Analisis Kebutuhan Modal Usaha BUMDes telah dilakukan perhitungan melalui Model-Model Analisis Kebutuhan, hanya saja dari kebutuhan Modal tersebut tidak didukung dengan optimalisasi pengelolaan usaha, sehingga perputaran modal yang awalnya ditetapkan tidak mampu tercapai.

8	Penulis	Nur Cahyadi, Alif Sulthon Basyari
	Tahun Penelitian	2023
	Judul Penelitian	Strategi Pengembangan BUMDes Melalui Optimalisasi Lahan Desa Sebagai Bentuk Upaya Peningkatan Pendapatan
	Variabel Penelitian	Strategi, Pengembangan BUMDes, Optimalisasi Lahan Desa, Peningkatan Pendapatan
	Hasil Penelitian	BUMDes telah memiliki usaha dan berjalan optimal, hanya saja karena perputaran arus kas yang dimiliki rendah, sehingga belum mampu menutupi kebutuhan operasional harian usaha. Olehnya itu dibutuhkan bentuk usaha lain yang sifat perputaran kasnya lancar sehingga biaya operasional harian BUMDes dapat diatasi,

C. Kerangka Pikir

Berdasar pada rumusan masalah yang menjadi acuan dalam menganalisis penelitian ini, maka berdasar pada rumusan masalah tersebut kerangka pikir yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :



Siklus dari Kerangka Pikir Tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pengelolaan BUMDes di Desa Cemba maka langkah yang harus dilakukan yakni Pengembangan Usaha melalui Optimalisasi Potensi Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa
2. Melalui Optimalisasi Potensi yang dimiliki oleh Desa, maka bentuk usaha yang akan dapat dikelola oleh BUMDes di Rancang agar nantinya dapat memberikan Dampak Terhadap BUMDes.

3. Menentukan Usaha yang dianggap Layak untuk di Kembangkan, maka langkah untuk itu dilakukan melalui kegiatan Analisis Kebutuhan Modal.
4. Setelah diperoleh hasil analisis dan diperoleh Gambaran tentang usaha yang potensial dikembangkan, maka selanjutnya dilakukan penetapan Usaha dan jumlah Modal yang dibutuhkan untuk selanjutnya difasilitasi oleh Pemerintah Desa dalam hal permodalan.
5. Langkah untuk memperoleh penghasilan yang maksimal, maka usaha yang telah diberikan modal diselenggarakan secara optimal dengan pola partisipatif yang melibatkan masyarakat.
6. Semakin besar Pendapatan yang diperoleh BUMDes, maka dampak terhadap Pemerintah Desa juga akan semakin meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode Kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar, H. (2020) bahwa sebuah penelitian dengan pendekatan Kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial disekelompok individu atau sekelompok orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah dikaji dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang Analisis Kebutuhan Modal BUMDes Madalleng Terhadap Pengembangan Potensi Desa Cemba Kabupaten Enrekang

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes Madalleng Desa Cemba Kabupaten Enrekang

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Dokumen dan Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Desember 2023-Februari 2024

C. Informan

Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Analisis Kebutuhan Modal BUMDes Madalleng kaitannya dengan Pengembangan Potensi Desa Cemba Kabupaten Enrekang, maka informan yang dijadikan sebagai sumber penggalan informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Kepala Dusun
3. Badan Permusyawaratan Desa.

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional menurut Sugiyono (2020) adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa dan masyarakat guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Modal

Modal dalam sebuah usaha dapat berupa uang atau non-uang atau bentuk barang lainnya yang mempunyai nilai ekonomis, sementara dari sisi perusahaan bahwa modal dapat berupa dana tunai atau dalam bentuk bangunan, mesin ataupun perlengkapan.

3. Analisis Kebutuhan Modal Kerja

Analisis Kebutuhan Modal Kerja adalah alat analisis finansial yang sangat penting bagi pengelola keuangan dalam suatu usaha, karena dapat digunakan untuk mengetahui seberapa

besar modal yang dapat dibutuhkan atau digunakan dan bagaimana kebutuhan tersebut dibelanjai.

4. Potensi Desa

Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah (Sugiyono, 2020). Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari :.

a. Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Narasumber (Informan)

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dianggap mampu memberikan informasi

sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dalam penelitian telah ditetapkan informan yakni yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan

c. Fenomena/Peristiwa/Aktivitas

Pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Cemba sejak didirikan pada dasarnya telah memiliki beberapa unit usaha, namun dalam penyelenggaraannya unit-unit usaha ini belum mampu memberikan hasil maksimal. Salah satu penyebab sehingga usaha-usaha tersebut tidak mampu berjalan sesuai yang diharapkan, karena sifat dari semua usaha yang dikembangkan belum mampu mendukung aktivitas dari masyarakat yang dominan berkaitan dengan pemanfaatan potensi yang ada di desa. Sementara dari sisi permodalan usaha oleh Pemerintah Desa bersedia memberikan bantuan sepanjang usaha BUMDes memiliki prospek yang baik.

d. Tempat atau Lokasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madalleng Desa Cemba Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu atau informasi terbaru yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan dalam penelitian (Sugiyono, 2020). Oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat beberapa

informasi tambahan yang dijadikan sebagai bagian dari penelitian ini dan sumber informasinya diperoleh dari :

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan nara sumber utama dalam proses penelitian ini adalah masyarakat terutama mereka yang mengembangkan usaha terkait dengan potensi sumber daya alam

b. Dokumen

Keberadaan Dokumen pada dasarnya akan sangat mendukung dalam melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Dokumen-Dokumen yang dijadikan sebagai acuan yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cemba terkait dengan Penganggaran pada BUMDes Madalleng

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan penelitian (Harahap, 2020)

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau nara sumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan Pemanfaatan Potensi dan Kebutuhan Modal yang akan dibutuhkan jika potensi tersebut dikembangkan sebagai sebuah unit usaha pada BUMDes Madalleng Desa Cemba.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mendukung pengelolaan data dan kajian teori dalam penelitian ini, maka salah satu metode yang dilakukan yakni dengan pengkajian buku-buku ilmiah, artikel majalah atau koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan hasil penelitian yang dilakukan.

3. *Browsing Internet*

Media Internet digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian, khususnya berkaitan dengan Analisis Kebutuhan Modal Usaha.

4. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi dimana alat pengumpulan datanya disebut *form* pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia antara lain Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola BUMDes Madalleng di Desa Cemba Kabupaten Enrekang.

5. Metode Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model wawancara ini dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas dimana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan keperluan penelitian.

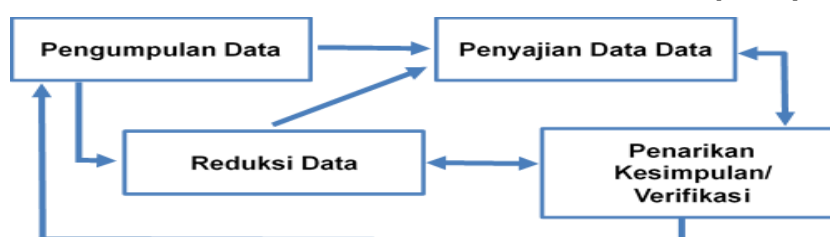
Penggunaan metode wawancara dengan model tidak terstruktur atau secara bebas dimaksudkan agar dalam sebuah penelitian dapat terjadi interaksi lebih jauh dalam menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi tidak hanya terikat pada pertanyaan awal, akan tetapi dapat dikembangkan secara lebih spesifik, dengan demikian informasi yang diperoleh lebih mendetail.

G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul yang selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Miles, M. B, Huberman, (2018), yang menggambarkan bahwa sirkulasi analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data
Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)



Sumber : Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)

Rangkaian Analisis yang ditampilkan pada Gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan

dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman (2018) dalam melakukan reduksi data maka model penyajian yang sering dilakukan adalah dengan teks

bersifat naratif dan juga terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang yang beribukota di Kecamatan Enrekang jika ditinjau berdasarkan tata letak dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yakni Makassar berada dibagian Sebelah Utara, dimana jarak antara ibukota Kabupaten dengan Ibukota Provinsi sekitar terletak $\pm$ 235 Km atau jika ditempuh dengan jalur darat kurang lebih 5-6 Jam perjalanan.

Kabupaten Enrekang sesuai alur sejarah yang dikembangkan oleh para tokoh masyarakat memberikan gambaran bahwa pada Abad ke XIV, kawasan-kawasan yang ada di Enrekang berada dalam satu federasi yang disebut dengan Maempong Bulan, yang memerintah di 7 Kawasan dimana saat itu lebih dikenal dengan sebutan “Pitu Massenrempulu” yakni Endekan, Kassa, Batu Lappa, Duri, Maiwa, Letta, dan Baringin. Kawasan-kawasan tersebut berada dibawah kekuasaan dari To Manurung

Kata Massenrempulu berasal dari kata Massere-Bulu (Bugis) atau dapat diartikan dengan Daerah-daerah yang berada sekitar pegunungan, dan ketika masa jaya kerajaan mulai berkuasa maka kawasan Enrekang berubah menjadi Lima Kawasan atau dikenal dengan sebutan Lima Massenrempulu yakni : Endekan, Duri, Maiwa, Kassa, Dan Batu Lappa.

Ketika dilakukan pembentukan pemerintahan kabupaten Sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, maka daerah-daerah yang sebelumnya merupakan bagian dari Konfederasi atau Federasi Massenrempulu dipecah menjadi beberapa distrik, dan kawasan Massenrempulu sendiri menjadi Kewedanaan Enrekang, selanjutnya sesuai dengan pembagian wilayah maka yang menjadi bagian dari Kewedanaan Enrekang adalah semua daerah yang awalnya menjadi bagian dari kerajaan Endekan, Duri Dan Maiwa, setelah berubah menjadi Swapraja dimana pucuk pimpinan pemerintahan disebut dengan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) maka wilayah yang dibawahinya terdiri dari Enrekang, Alla, Buntu Batu, Malua, dan Maiwa.

Awal Enrekang terbentuk menjadi Daerah Kabupaten memiliki 10 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km² dimana populasi penduduk waktu itu ± 190.579 Jiwa, dimana rata-rata penduduk di Kabupaten Enrekang memeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian. Setelah diterbitkannya PERDA Kabupaten Enrekang Nomor : 4,5,6 dan 7 Tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Pembentukan 4 Kecamatan Definitif, maka sampai pada saat ini Kabupaten Enrekang memiliki 12 Kecamatan Defenitif yakni :

1. Enrekang ibukotanya Enrekang,
2. Maiwa ibukotanya Maroangin,
3. Anggeraja ibukotanya Cakke,

4. Baraka ibukotanya Baraka,
5. Alla ibukotanya Belajen,
6. Curio ibukotanya Curio,
7. Bungin ibukotanya Bungin,
8. Malua ibukotannya Malua,
9. Cendana ibukotanya Cendana,
10. Baroko ibukotanya Baroko,
11. Buntu Batu ibukotanya Pasui, dan
12. Masalle ibukotanya Lo'ko.

Kecamatan-kecamatan Defenitif tersebut membawahi 112 Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari 17 Kelurahan dan 95 Desa

B. Desa Cemba Kecamatan Enrekang

1. Gambaran Singkat Desa Cemba

Desa Cemba merupakan salah satu dari 12 Desa dan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Enrekang, dimana dari jumlah luasan Desa Cemba sesuai Data Badan Pusat Statitistik yakni 9,2 Km² atau 3,16% dari 291.19 Km² Total Luas Kec. Enrekang, yang tingkat kepadatan penduduk untuk Desa ini berkisar 166,30 Jiwa per Kilometer Persegi dan merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar bersama dengan Desa Karueng dan Tuara.

2. Kondisi Geografis Desa Cemba

Desa Cemba sesuai dengan pemetaan pewilayahan merupakan salah satu Desa di Enrekang yang berbatasan dengan Kabupaten lain yakni Kabupaten Pinrang. Adapun Batas-batas dari Wilayah Desa Cemba dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tunga Kecamatan Enrekang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pinang dan Kel. Leoran Kecamatan Enrekang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaseralau Kecamatan Batu Lappa Kab. Pinrang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karueng Kecamatan Enrekang.

Mempertegas tentang batas-batas tersebut dapat dilihat pada peta Wilayah Kabupaten Enrekang berikut :

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Enrekang



Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km dari Ibukota Kecamatan, dan

Desa Cemba sendiri memiliki jarak sejauh 5 Km, atau merupakan salah satu Desa yang terdekat dari Ibukota Kecamatan. Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Juppandang	1	4	Karueng	3	5
Galonta	1	3	Cemba	5	8
Puserren	2	5	Ranga	8	12
Lewaja	3	4	Tungka	12	15
Leoran	3	1	Kaluppini	13	15
Tuara	9	12	Buttu Batu	13	17
			Tokkonan	15	17
			Lembang	15	17
			Temban	15	19
			Rosoan	19	21
			Tallu Bamba	20	23
			Tobalu	50	52

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

C. Kondisi Demografis Desa Cemba

Terhadap kondisi yang berkaitan dengan keadaan Demografis dari Desa Cemba dapat disajikan pada beberapa Tabel berikut :

1. Keadaan Iklim

Keadaan iklim di Desa Cemba terdiri dari Tiga Musim yakni : Musim Hujan, Kemarau dan Musim Pancaroba. Dimana Musim Hujan biasanya terjadi antara bulan Januari s/d April, Musim Kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

2. Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Cemba sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 1.304 Jiwa terdiri dari 662 Laki-Laki dan 642 Perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 315 Keluarga. Kondisi Kependudukan Desa Cemba secara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk sesuai dengan Dusun/Lingkungan

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1.	Dusun Membura	199	179	378	96
2.	Dusun Cemba	333	331	664	153
3.	Dusun Katimbang	130	132	262	66
Jumlah		662	642	1.304	315

Sumber : Data Kependudukan Desa Cemba Tahun 2022

3. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Penduduk

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH
297	61	11	239

Sumber : Data Kependudukan Desa Cemba Tahun 2022

D. Visi dan Misi Desa Cemba

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Cemba Yang Maju, Adil, Aman Dan Sejahtera Yang Diridohi Oleh Allah SWT

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- b. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat
- c. Menciptakan iklim kondusif
- d. Pemberdayaan kelembagaan.

E. Struktur Pemerintahan Desa Cemba

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Cemba



F. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madalleng Desa Cemba

Awal mula terbentuknya BUMDes Desa Cemba yakni pada tahun 2016 selajutnya dinamai dengan BUMDes Desa Cemba, setelah satu tahun berdirinya yakni pada tahun 2017 BUMDes Desa Cemba membentuk Satu Unit usaha yaitu Unit Usaha Penyewaan Molen dengan tujuan membantu dan mendukung pemerintah dan masyarakat khususnya dalam kegiatan pekerjaan konstruksi seperti

pembangunan jalan dan pembangunan rumah tinggal atau untuk keperluan lainnya. .

Tahun 2018 pengurus BUMDes setelah memperoleh Badan Hukum maka Status BUMDes dirubah menjadi Badan Usaha dengan nama CV BUMDes Madalleng Desa Cemba. Arti dari Madalleng itu sendiri adalah rezeki, dengan harapan nantinya rezeki BUMDes akan selalu berlimpah dan pada tahun 2018 ini juga pengurus BUMDes menambah unit usaha baru yaitu Unit Usaha Sullung Kreatif.

Tujuan unit usaha ini didirikan untuk memberikan tempat pelatihan dan keinginan berwirausaha dibidang kerajinan bagi pemuda yang memiliki jiwa usaha dan kreativitas dibidang seni. Pada tahun 2019 BUMDes Desa Cemba kembali menambah Unit Usaha yakni Unit Usaha Bengkel Desa, dimana unit usaha berdasarkan tinjauan dari masyarakat dianggap memiliki peluang berkembang sangat besar karna belum ada bengkel di Desa Cemba.

Tahun 2020 BUMDes Madalleng Desa Cemba tidak beroperasi dikarena mendapatkan dampak dari adanya Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 BUMDes Madalleng Desa Cemba membentuk atau merevisi kembali pengurusnya yang dilaksanakan melalui musyawarah BUMDes.

G. Visi dan Misi BUMDes Desa Cemba

1. Visi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cemba

2. Misi

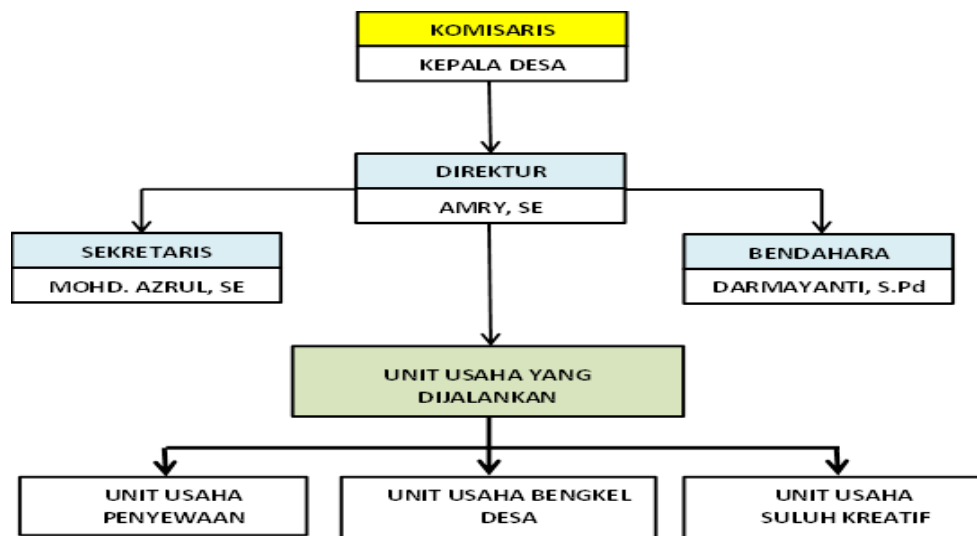
Memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, memberantas praktek ijon dan rentenir dan memudahkan masyarakat Desa Cemba dalam mendapatkan modal usaha dalam skala kecil dan berimbang sesuai dengan keberadaan modal yang dikelola BUMDes.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud untuk menjadi penyedia barang dan jasa bagi masyarakat berupa pelayanan ekonomi guna meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
- b. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan wahana badan usaha milik desa.

H. Struktur Organisasi BUMDes Madalleng

Gambar 4.3
Struktur Organisasi BUMDes Madalleng



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pendapatan Desa Cemba Kab. Enrekang

Pendapatan Desa Cemba berdasarkan APBDes untuk

Tahun Anggaran 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Pendapatan Desa Cemba Tahun 2021-2022

JENIS PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN			
	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Desa	-	630,000		
Hasil Usaha Desa	-	630,000		
Pendapatan Transfer	1,368,064,000	1,452,968,450	1,535,548,973	1,274,417,153
Dana Desa	868,346,000	919,727,000	1,039,809,000	774,874,000
Bagian dari Hasil Pajak &	-	17,629,450	48,736,973	48,736,973

Retribusi Daerah Kab

Alokasi Dana Desa	459,992,000	515,612,000	447,003,000	459,992,000
Bunga Bank	87,000	988,000	1,832,597	1,571,586
JUMLAH PENDAPATAN	1,368,151,000	1,454,586,450	1,537,381,570	1,285,174,559

Sumber : APBDes Desa Cemba Tahun 2021-2023

Gambaran terhadap Pendapatan yang diperoleh Desa Cemba sebagaimana dituangkan pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa selama kurun waktu antara Tahun 2019 hingga 2022 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Cemba hanya ada di Tahun 2020 dan merupakan bagi hasil dari usaha BUMDes yang masih berjalan. Sementara untuk tahun lainnya Pendapatan Desa hanya bersumber dari Dana Transfer dan juga hasil Bunga Bank.

Permasalahan bahwa tidak kontinyunya Pendapatan dari BUMDes menurut Kepala Desa, dikarenakan usaha yang dikelola saat ini dapat dianggap tidak lagi berjalan secara maksimal. Sementara terkait dengan Modal yang disalurkan ke BUMDes, secara umum dapat dikatakan telah kembali.

2. Pengembangan BUMDes Madalleng Desa Cemba

BUMDes yang ada Desa Cemba sejak memiliki status dan Berbadan Hukum, diberi nama “Madalleng” artinya Beruntung. Adapun usaha yang dikembangkan saat itu yakni Usaha Bengkel, Penyewaan Moleng dan Sullung Kreatif yang bergerak dibidang Penjualan Kebutuhan Petani. Hanya saja sejak didirikan BUMDes

Madalleng awalnya menunjukkan hasil cukup lumayan, dimana perputaran Modal Kerja berjalan cukup besar.

Pernyataan terhadap partisipasi BUMDes sejak didirikan, dikuatkan oleh Kepala Desa saat dilakukan wawancara dimana diuraikan bahwa :

“... Partisipasi BUMDes dalam pengembangan ekonomi di Desa Cemba pada dasarnya telah dirasakan, dimana pada awal BUMDes ini ada walaupun belum dilabel dengan nama Madalleng telah mampu memberikan sumbangsih cukup besar terhadap Pembangunan Desa, Terlebih saat telah memiliki legalitas hukum dengan sebutan Madalleng, BUMDes ini pernah mencatat penghasilan cukup besar yakni Rp.40.000.000,-. Olehnya itu harapan untuk BUMDes Madalleng dapat dikembangkan kembali sangatlah besar ...”

Sementara dari Sekretaris Desa saat mendampingi Kepala Desa ketika dilakukan wawancara juga memberikan pernyataan, terkait dengan upaya untuk melakukan pengembangan terhadap usaha untuk BUMDes, dimana untuk orientasi usaha yang akan dilakukan nantinya diarahkan pada pemanfaatan potensi yang ada di desa Cemba.

Keinginan dari Pihak Pemerintah Desa untuk merubah arah kebijakan pengembangan BUMDes, didasari pada ketertarikan terhadap kajian akademik yang berkaitan dengan Pengembangan Usaha BUMDes melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi yang didukung oleh Pola Analisis Kebutuhan Modal terhadap usulan usaha BUMDes. Pernyataan Sekreraris

Desa tersebut juga didukung oleh Kepala Desa yang memberikan pernyataan berikut :

“... Selama ini pola pendekatan yang dilakukan terhadap pengembangan usaha BUMDes dapat dikatakan kurang tepat, sebab yang ada dimindset mereka bagaimana BUMDes bisa menghasilkan dan mendukung pendapatan desa, namun setelah mencermati kajian akademik dimana pola pengembangan BUMDes diorientasikan pada model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa dan didukung pula analisis kebutuhan modal usaha, hal ini membuka wawasan pihak Pemerintah Desa untuk merubah arah kebijakan pengelolaan BUMDes, sedangkan untuk masalah Modal Pemerintah bersedia mendukung secara utuh langkah BUMDes, sepanjang memiliki dasar atau analisis yang rasional...”

Menyikapi tentang konsekuensi permodalan yang nantinya dapat digunakan oleh BUMDes dalam pengembangan kegiatan usaha, Pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat mengapresiasi dan mendukung keinginan Kepala Desa. Adapun penegasan dari Pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait masalah modal ini antara lain :

“ ... Terkait dengan Persoalan Modal yang dibutuhkan oleh BUMDes, pada dasarnya pihak BPD sangat mendukung keinginan dari Kepala Desa, sepanjang usaha yang dilakukan oleh BUMDes memiliki dasar analisis terhadap pengelolaan anggaran yang diberikan”

“ Bahwa usaha yang telah dilakukan BUMDes seperti Penyewaan Moleng dan Sullung Kreatif, tetap dipertahankan namun dibentuk usaha lainnya dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi yang ada di desa, dengan memanfaatkan semua sumber daya baik itu Potensi Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia.

3. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Madalleng Desa Cemba

a. Pemetaan Potensi Desa

Mendukung harapan dari pihak Pemerintah Desa dan seluruh Pamong Desa, maka dalam penelitian ini kajian awal yang dilakukan yakni Memetakan semua potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa ini dan dianggap memiliki kelayakan untuk dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha.

Hasil Pemetaan terhadap potensi yang dianggap dapat dikelola menjadi usaha BUMDes, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.2
Potensi dan Peluang Usaha BUMDes

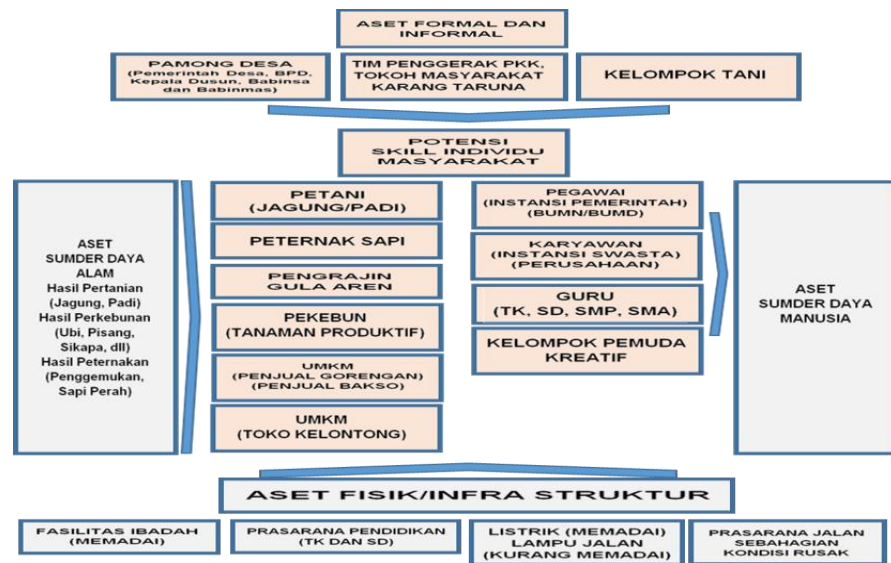
No	Jenis Potensi Desa	Bentuk Usaha
1	Jagung Kapasitas Produksi : Rata-Rata 2.300 Ton per Masa Panen dalam satu tahun	1. Usaha Perantara (<i>Brokering</i>) BUMDes berperan menjadi Perantara Penjualan Hasil Panen Jagung dari Masyarakat 2. Penyewaan Mesin Perontok Jagung 3. Pemanfaatan Limbah (Tongkol Jagung) Menjadi Briket
2	Mata Air dan Pansimas	1. Membangun Jaringan Instalasi Perpipaan untuk Penyaluran Air Bersih Kerumah Masyarakat 2. Usaha Pengelolaan Air dalam Kemasan dan Usaha Gallon
3	UMKM Terdiri dari : Penjual Campuran : 35 Toko Kecil Penjual Gorengan 14 Lapak/Gerobak Penjual Bakso 4 Lapak/Gerobak	Membangun Usaha Pertokoan dengan sifat Semi Grosir Tujuan Mempermudah UMKM dan Toko-Toko Kecil memperoleh Barang dengan harga yang bersaing dengan pola pemba yaran sistem Kredit Lunak
4	Pengrajin Gula Aren Kapasitas Produk dari Pohon Aren Rata : 400 Liter/Perminggu	1. Inovasi Produk Menjadi Gula Semut 2. Penyewaan Mesin Oven 3. Penjualan Produk Gula Semut
5	Kelompok Peternak Jumlah : 51 KK	1. Penggemukan Sapi dengan

		Sistem Bagi Hasil
		2. Bantuan Indukan Sapi Ternak dengan Sistem Bagi Hasil
		3. Bantuan Indukan Sapi Perah untuk Pembuatan Dangka
		4. Pembuatan Pupuk Organik
6	Pengembangan Destinasi Wisata - Sungai - Kawasan Perbukitan	1. Membangun Resource yang bebas dari Banjir pada Bantaran Sungai Mata Allo 2. Membangun Wisata Kuliner dengan Memanfaatkan Bukit dan Pemandangan Alam
7	Home Industry	1. Pembuatan Keripik dari Pisang (Buah dan Kulit Pisang) 2. Pembuatan Keripik Sikapa
8	Pembuatan Media Tanam	1. Pembuatan Media Tanam dari Sabuk Kelapa 2. Media Tanam dari Sekam Padi

Sumber : Diolah dari Hasil Pendataan dan Wawancara

Pemetaan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada Potensi Sumber Daya Alam, sebab mengingat dalam Pengelolaan BUMDes juga dibutuhkan keberadaan dari sumber Daya Manusia dan semua bentuk Potensi yang ada di desa Cemba, maka secara menyeluruh hasil pemetaan untuk semua jenis Potensi yang ada di Desa baik itu Potensi Fisik, Non Fisik dan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 5.1
Kondisi Potensi Desa Cemba



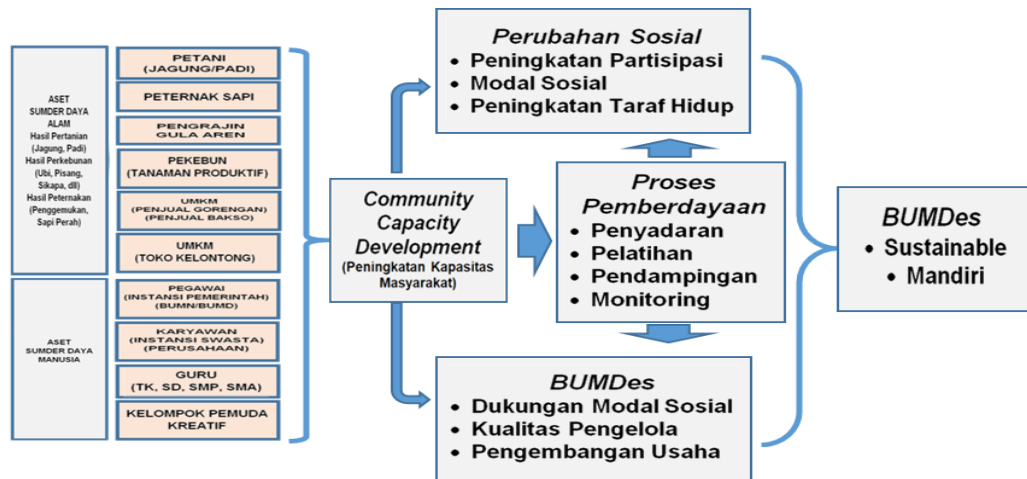
Sumber : Diolah Berdasarkan Hasil Wawancara dan Pengamatan.

Potensi yang dimiliki oleh Desa Cemba sebagaimana pada Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa dukungan terhadap upaya untuk mengembangkan BUMDes sangatlah besar, sebab Potensi Alam yang dapat dijadikan sebagai Usaha BUMDes juga sangat memadai demikian pula dari unsur Sumber Daya Manusia.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagaimana upaya untuk dapat memanfaatkan semua potensi tersebut, sehingga menjadi bagian dari Pengembangan BUMDes, dan langkah yang dapat ditawarkan sesuai hasil analisis terhadap potensi dan peluang usaha BUMDes yakni dengan model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa. Adapun Siklus dari Proses Pemberdayaan tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 5.2

Siklus Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan BUMDes



Sumber : Diolah Berdasar pada Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa.

Siklus Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi yang ada di Desa sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.2, inti permasalahannya terletak pada bagaimana melaksanakan Konsep Pemberdayaan dengan melibatkan semua pihak, karena melalui konsep ini secara sendirinya memiliki dampak sangat besar terhadap perubahan sosial dimasyarakat dan juga secara tidak langsung akan memberikan dukungan untuk mendapatkan pengelola yang memiliki kualitas untuk dapat mengembangkan usaha BUMDes.

b. Analisis Kebutuhan Modal Usaha BUMDes

Berdasar pada hasil analisis terhadap potensi-potensi yang ada di Desa Cemba dan dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes Madalleng, dari hasil diskusi dengan pihak Pemerintah Desa, maka beberapa usaha yang dianggap layak

untuk dikelola dan selanjutnya akan dianalisis terhadap modal yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.3
Potensi Usaha BUMDes

No	Jenis Potensi Desa	Bentuk Usaha
1	Jagung Kapasitas Produksi : Rata-Rata 2.300 Ton per Masa Panen	1. Usaha Perantara (<i>Brokering</i>) 2. Penyewaan Mesin Perontok Jagung
2	Pengrajin Gula Aren Kapasitas Produk dari Pohon Aren Rata : 400 liter/Perminggu	1. Penyewaan Mesin Oven Gula Semut 2. Penjualan Produk Gula Semut
3	Pengelolaan Air Bersih	1. Investasi Jaringan Perpipaan 2. Retribusi Penggunaan Fasilitas Air Bersih
4	Kelompok Peternak Jumlah : 51 KK	Penggemukan Sapi dengan Sistem Bagi Hasil
5	Pembuatan Briket dari Tongkol Jagung (Rintisan)	Produk Briket Arang dari Tongkol Jagung

Sumber : Diolah dari Hasil Pendataan dan Wawancara

Penetapan terhadap 5 (Lima) bentuk potensi yang selanjutnya akan dijadikan prioritas bagi BUMDes, didasarkan pada pertimbangan bahwa semua jenis usaha ini selain nantinya diharap mampu memberikan kontribusi dalam hal keuntungan bagi BUMDes, juga diharap nantinya dapat pula memberikan dukungan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Desa Cemba. Pertimbangan lainnya bahwa Potensi ini secara cepat dapat dilaksanakan dan dijadikan usaha BUMDes.

Mendukung pertimbangan terhadap dipilihnya 5 (Lima) Potensi Desa ini, maka analisis terhadap pola perencanaan

untuk Pemanfaatan Anggaran, Potensi Usaha dan Analisis Kebutuhan Modal Usaha dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Usaha Perantara (*Brokering*)

a) Dasar Pertimbangan :

- (1) Usaha ini dapat menjadi sarana untuk menstabilkan harga jual Jagung Petani yang selama ini beragam, sehingga berdampak adanya persaingan tidak sehat antar petani.
- (2) Menghindari adanya keterlibatan Tengkulak, sehingga Petani tidak maksimal mendapatkan keuntungan dari hasil panennya
- (3) Pemasaran dari hasil Panen Petani menjadi jelas dan terarah.
- (4) BUMDes dapat memberikan bantuan kepada Petani lebih banyak termasuk Pengadaan Pupuk dan juga penggunaan mesin perontok Jagung.
- (5) Tingkat keuntungan yang diperoleh Petani menjadi Lebih besar.

b) Analisis Anggaran :

Rancangan anggaran dan estimasi pendapatan yang dapat diperoleh BUMDes dan juga masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.4

Analisis Pengembangan Usaha BUMDes Dalam Bentuk Usaha Perantara (*Brokering*)

1	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Usaha Perantara (<i>Brokering</i>)
	Jumlah Panen Desa Cemba (Estimasi Terendah)	1.750 Ton/1 Tahun
	Target Beli BUMDes	1.000 Ton/1 Tahun
	Nilai Beli Pedagang (Pasaran)	4.500,-/Kg
	Nilai Beli Pedagang dari Petani	3.300,-/Kg
	Selsih Harga Beli Pedagang	1.200,-/Kg
	Estimasi Harga Beli BUMDes	3.500-4.000/Kg
	Selisih Harga Beli BUMDes dengan Pedagang	200-700,-/Kg
	Estimasi Keuntungan BUMDes	
	Harga Beli Maksimal	4.000,-/Kg
	Harga Jual (Pasaran)	4.500,-/Kg
	Selisih Harga	500,-/Kg
	Harga Karung (Ukuran 100 Kg)	5.000,-/Buah
	Konversi Harga Karung ke Kg	50,-/Kg
	Upah Kerja	300,-/Kg
	Selisih setelah Beban	150,-/Kg
	Target Pembeilan dari Petani	1.000 Ton/1 Tahun
	Konnversi Pembelian (Kg)	1.000.000 Kg
	Nilai Susut 2%	20.000 Kg
	Estimasi Penjualan	980.000 Kg
	Estimasi Keuntungan	147.000.000,-

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

c) Analisis Kebutuhan Anggaran :

Berdasar pada Analisis Anggaran pada Tabel 5.4, maka, terhadap Analisis Kebutuhan Modal yang akan digunakan terhadap pengembangan Usaha BUMDes yakni Perantara (*Brokering*) Pembelian Jagung dari Para Petani dalam rentang waktu satu kali masa panen di Desa Cemba, dapat diuraikan berikut ini :

Diketahui :

Modal Investasi (MI)

Gudang dan Lantai Pengereng

Sewa Tempat Pengering (1 Tahun)	10.000.000,-
Pembuatan Lantai Pengering	5.000.000,-
Jumlah Modal Investasi	15,000.000,-
Modal Kerja (MK)	
Pembelian Jagung	
Estimasi Target Pembelian	1.000.000,-/Kg
Nilai Harga Beli BUMDes	4.000,-
Jumlah Modal Kerja	4.000.000.000,-
Modal Operasional (MO)	
Upah Kerja (300,-/Kg)	150.000.000,-
Harga Karung Per (10.000 Lbr x 5.000)	50.000.000,-
Jumlah Modal Operasional (MO)	200,000.000-

Jika Model Persamaan yang digunakan adalah :

$$\text{Modal Awal} = MI + MK + MO$$

Dimana

MI = **Modal Investasi** : dana yang dibelanjakan untuk keperluan alat usaha yang digunakan sebagai penunjang kegiatan bisnis perusahaan

MK = **Modal Kerja** : seluruh biaya yang diperlukan perusahaan guna memenuhi kebutuhan bahan baku serta alat-alat pengembangan usaha.

MO = **Modal Operasional** : seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan.

Maka jumlah Modal yang dibutuhkan BUMDes untuk usaha *Brokering* yakni :

$$\text{Modal Awal} = 15,000.000 + 4.000.000.000 + 200.000.000$$

$$\text{Modal Awal} = 4.215.000.000,$$

Nilai yang diperoleh tersebut tentunya tidak menjadi sekaligus harus disiapkan oleh BUMDes, namun setidaknya untuk dapat memulai usaha Perantara (*Brokering*) maka jumlah pembelian dapat diestimasi sebanyak 100 Ton dengan perhitungan nilai Modal sebagai berikut

Target Pembelian	
Jumlah Target Pembelian	1.000 Ton
Modal Yang dibutuhkan	4.215.000.000,-
Modal Untuk Pembelian Per Ton	4.215.000,-/Ton

Berdasar analisis ini maka dapat dikatakan bahwa Estimasi Modal yang dibutuhkan BUMDes untuk melakukan pembelian Jagung setiap Ton sebesar Rp.4.215.000,-. Nilai inilah dapat dijadikan acuan dalam menentukan berapa banyak jagung akan dibeli dan berapa banyak Modal dibutuhkan.

2) Mesin Perontok Jagung

a) Dasar Pertimbangan

- (1) Usaha ini dapat meghindarkan Petani dari Nilai Susut yang besar, dikarenakan harus menunggu antrian penggunaan Mesin Perontok Jagung.
- (2) Meringankan Biaya Operasional Petani dalam mendatangkan Mesin Perontok Jagung.
- (3) Menghindari Keterikatan Petani dari Pedangan yang melakukan Pembelian tidak seragam.
- (4) Menghindarkan petani menurutnya jumlah Hasil Panen yang diakibatkan oleh serangan hama dan hewan pengganggu.

b) Analisis Anggaran dan Kebutuhan Modal

Rancangan anggaran dan estimasi pendapatan yang dapat diperoleh BUMDes dan juga masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.5
Potensi Usaha Penyewaan Mesin Perontok Jagung

2	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Penyewaan Mesin Perontok Jagung
	Pembelian Mesin	10.500.000,-/Unit
	Jumlah Hasil Panen Petani	1,750 Ton
	Target Operasi Mesin	1.000 Ton
	Kemampuan Operasi Mesin	30 Ton/Hari
	Estimasi Masa Operasi Mesin disesuaikan dengan Target Operasi	30 Hari
	Harga Sewa Mesin	50.000,-/Ton
	Estimasi Biaya Sewa Perhari	1.500.000,-
	Estimasi Biaya Sewa dapat diterima sesuai Target Operasi	50.000.000,-

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Kebutuhan Modal untuk usaha ini adanya pada belanja Pembelian Mesin Perontok Jagung, sementara biaya operasional seperti Bahan Bakar, Pekerja dan Biaya Angkut ke Lokasi menjadi beban Petani.

3) Pengelolaan Gula Semut

a) Dasar Pertimbangan :

- (1) Merubah Pola Pikir Masyarakat melakukan inovasi produk dari Gula Aren Menjadi Gula Semut
- (2) Melalui usaha ini Tingkat Penghasilan Pengrajin Gula Aren dapat meningkat.

- (3) Kontinuitas Produksi berjalan maksimal tanpa harus menunggu pemesanan konsumen.
- (4) Meningkatkan kembali motivasi masyarakat untuk menjalankan usaha ini yang sekarang hanya 2 orang yang menjalankannya.

b) Analisis Anggaran

Rancangan anggaran dan estimasi pendapatan yang dapat diperoleh BUMDes melalui pemberdayaan masyarakat pengrajin Gula Aren dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.6
Analisis Potensi Usaha Penyewaan Mesin Oven dan Penjualan Gula Semut

3	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Penyewaan Mesin Oven Gula Semut
	Jumlah Produksi Air Nira	450 Liter/Minggu
	Jumlah Air Nira yang Dapat Diolah	400 Liter/Minggu
	Estimasi Penghasilan Pengrajin (Produk Gula Aren)	
	Kebutuhan Nira/1 Kg Gula Aren	8 Liter Air Nira
	Produk Gula Aren/Minggu	50 Kg
	Harga Jual Gula Aren	20.000,-/Kg
	Penghasilan Pengrajin	1.000.000,-/Minggu
	Biaya Produksi	200.000,-/Minggu
	Keuntungan Bersih	800.000,-/Minggu
	Estimasi Penghasilan Pengrajin (Produk Gula Semut)	
	Kebutuhan Nira/1 Kg Gula Semut	7 Liter Air Nira
	Produk Gula Semut/Minggu	57.1 Kg
	Harga Jual Gula Semut	27.500,-/Kg
	Penghasilan Pengrajin	1.570.000,-/Minggu
	Biaya Produksi	175.000,-/Minggu
	Keuntungan Bersih	1.395.000,-/Minggu
	Pengelolaan Usaha BUMDes	
	Penyewaan Mesin Oven	
	Investasi BUMDes	
	Harga Mesin Open Gula Semut de	18.500.000,-
	Kapasitas Pengering	100 Kg

Beban Pembiayaan Penyewaan Mesin Oven Gula Semut	
Biaya Lisrik/Satu Kali Produksi	25.000,-
Biaya Listrik/Bulan	150.000,-
Upah Operator/Bulan	500.000,-
Jumlah Beban/Bulan	650.000,-
Estimasi Penghasilan	
Jumlah Produk Gula Pengrajin	57,1 Kg
Sewa Mesin Pengering	5.000,-/Kg
Penghasilan Perminggu	285.500,-
Penghasilan Perbulan	1.142.000,-
Keuntungan Sewa Oven setelah Beban	467.000,-/Bulan
Keuntungan Penjualan Gula Semut	
Harga Beli dari Pengrajin	27.500,-/Kg
Biaya Pengemasan (Upah dan Plastik)	1.500,-/Kg
Modal Penjualan Gula Semut	29.000,-/Kg
Harga Jual Gula Semut	30.000,-/Kg
Keuntungan Penjualan	1.000,-/Kg
Keuntungan Bersih Per Minggu	57,100,-
Keuntungan Bersih Penjualan Perbulan	228.400,-/Bulan
Estimasi Keuntungan Bersih (Sewa Oven+Penjualan)	695.400,-/Bulan
Estimasi 1 Tahun	8.344.800,-

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

c) Analisis Kebutuhan Anggaran

Berdasar pada hasil analisis anggaran pada Tabel 5.6, maka kebutuhan Pembelian dan Penjualan Produk Gula Semut, tidak termasuk Investasi untuk Pembelian Mesin Oven dapat dihitung sebagai berikut :

Modal Pembelian	
Produk Gula Semut Pengrajin	57.1 Kg
Harga Beli oleh BUMDes	27.500,-/Kg
Total Harga Pembelian	1.570.000,-/Minggu
Kebutuhan Modal Perbulan	6.281.000,-
Modal untuk Biaya	
Biaya Pengemasan (Upah dan Plastik)	1.500,-/Kg
Biaya Per Minggu	85.650.-
Total Kebutuhan Biaya Perbulan	342.600,-
Kebutuhan Modal Perbulan	6.623.600,-

Hasil perhitungan Modal yang dibutuhkan untuk usaha Penjualan Produk Gula Semut dalam satu bulannya di estimasi sebanyak Rp.6.623.600,-, dimana estimasi keuntungan bersih dari Modal yang dikeluarkan yakni sebesar Rp.695.400,-.

Sementara untuk Investasi usaha yakni Pembelian Mesin Oven sebesar Rp.18.500.000,- jika menghitung keuntungan setiap bulannya yang dapat diperoleh BUMDes, maka estimasi waktu pengembalian modal pembelian mesin dapat dilakukan selama 27 Bulan. Hanya saja estimasi dapat mundur dan bahkan dapat dipercepat jika produksi Gula Semut semakin besar. Artinya efisiensi penggunaan mesin akan semakin meningkat.

4) Pengelolaan Air Bersih

a) Dasar Pertimbangan

(1) Usaha ini lebih diorientasikan untuk menjalankan fungsi BUMDes yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam hal pemanfaatan Air Bersih.

(2) Mengefesiensikan Biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat karena selama ini untuk dapat memperoleh air bersih mereka menggunakan

sarana pompa listrik, tentunya dengan usaha ini masyarakat dapat mengurangi beban pembayaran listrik mereka.

(3) Memberikan Pelayanan terhadap pemanfaatan Air Bersih yang berasal dari Mata Air dan PAMSIMAS yang terdapat di Desa Cemba.

(4) BUMDes dalam pengelolaan usaha air bersih ini tidak berorientasi untuk memperoleh keuntungan, walaupun terdapat biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh masyarakat akan tetapi nilainya tidak terlalu besar, bahkan sangat terjangkau.

b) Analisis Anggaran

Analisis Anggaran terhadap pengelolaan usaha Pengelolaan Air Bersih ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.7
Analisis Potensi Usaha Pengelolaan Air Bersih

4	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Pengelolaan Air Bersih
	Estimasi untuk Investasi Jaringan Perpipaan kapasitas 100 KK	20.000.000,-
	Biaya Iuran Perbulan	15.000,-/KK
	Jumlah Iuran Diterima Perbulan	1.500.000,-
	Upah Pungut Iuran	750.000,-
	Keuntungan Kas Perbulan	750.000,-
	Keuntungan untuk 1 Tahun	9.000.000,-

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Investasi yang pada usaha ini untuk Tahap awal dengan ruang lingkup melayani 100 KK berupa

Pemasangan Jaringan Perpipaan dari Mata Air dan juga PAMSIMAS atau Bak Penampungan Bantuan Pemerintah ke masing-masing rumah penduduk.

Terhadap Modal yang dibutuhkan untuk usaha ini dominan digunakan untuk pengelolaan jaringan perpipaan kerumah-rumah penduduk, sementara keuntungan dari usaha ini akan diperuntukkan pada perbaikan mutu Penyaluran Air Bersih, dapat berupa pembelian Pompa sehingga nantinya dapat memberi kepuasan kepada masyarakat.

5) Usaha Penggemukan Sapi

Sifat dari usaha ini adalah Investasi dalam rentang waktu 1 satu tahun, hanya saja permasalahan utama dari usaha ini adalah besarnya modal yang dibutuhkan, selain itu perputarannya cukup lambat. Hanya saja dalam hal proses penjualan dianggap tidak terlalu sulit, terlebih lagi Desa Cemba selama ini termasuk salah satu Pemasok Hewan Kurban di Kabupaten Enrekang.

Beberapa pertimbangan lain sehingga usaha ini dijadikan sebagai salah satu bagian dari pengembangan BUMDes Madalleng Desa Cemba yakni:

- a) Meningkatkan kembali produktivitas ternak sapi yang mulai mengalami penurunan, akibat banyaknya ternak

sapi yang belum dewasa harus dijual dalam rangka membiayai kebutuhan mendesak dari masyarakat.

- b) Masyarakat tidak memiliki alternatif lain memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak, sehingga langkah satu-satunya menjual hewan ternak mereka, termasuk Sapi Betina yang masih produktif. Sehingga melalui upaya penggemukan ini diharap mampu menjadi solusi bagi masyarakat.

Berdasar pada pertimbangan tersebut, dan untuk mengetahui tingkat kebutuhan anggaran serta estimasi keuntungan yang dapat diperoleh BUMDes dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.8
Analisis Potensi Usaha Penggemukan Sapi
(Investasi Jangka Panjang)

5	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Penggemukan Sapi
	Harga Anakan Sapi	7.000.000,-/Ekor
	Jumlah Peternak	51 KK
	Estimasi Modal yang dibutuhkan	357.000.000,-
	Harga Penjualan Sapi/Ekor	15.000.000,-
	Rata-Rata Selisih Harga Jual	8.000.000,-
	Pembagian Keuntungan	
	70% Untuk Peternak	5.600.000,-
	30% Untuk BUMDes	2.400.000,-
	Estimasi Keuntungan Penjualan untuk 51 Ekor Sapi	122.400.000,-

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Pola pengembangan yang dapat dilakukan oleh BUMDes tidak mesti harus mengadakan sebanyak jumlah peternak di Desa Cemba, namun proses pemberdayaan dapat

dilakukan secara bertahap. Sementara besarnya keuntungan diperuntukkan kepada Petani karena Biaya untuk pemeliharaan seperti Pemberian Makan, Vaksin dan lain-lain menjadi tanggung jawab peternak.

6) Usaha Briket Tongkol Jagung

Pengembangan Usaha dalam bentuk Pengelolaan Tongkol Jagung menjadi Briket Arang jika melihat bahan baku yang dibutuhkan yakni Tongkol Jagung, dimana selama ini hanya menjadi limbah, maka prospeknya dapat dikatakan sangat menjanjikan. Hanya saja untuk dalam pengelolaan usaha tentunya Pengurus BUMDes atau mereka yang akan dipercayakan mengelola usaha ini, harus mendapatkan pelatihan secara intensif.

Proses Pembuatan Briket dari Tongkol Jagung, jika hanya sebatas konsumsi biasa tentunya dapat dilakukan secara umum, akan tetapi karena mempertimbangkan bahwa prospek usaha ini tidak hanya untuk skala lokal bahkan dapat berskala ekspor, maka kualitas dari Briket menjadi salah satu pertimbangan.

Pengelolaan Briket dari Tongkol Jagung ini juga dapat menjadi wadah Pelestarian Lingkungan, dimana masyarakat yang biasanya menggunakan Kayu dengan mengeksploitasi pohon-pohon disekeliling mereka untuk

dijadikan sebagai Bahan Bakar, secara perlahan dapat dirubah, selain itu jika menghitung pembiayaan dengan menggunakan Gas Elpiji dibanding dengan Briket, maka masyarakat dapat melakukan penghematan dan juga menghindari kelangkaan Gas Elpiji.

Analisis Kebutuhan anggaran terhadap pengelolaan usaha Briket dari Tongkol Jagung ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.9
Analisis Potensi Usaha Briket Tongkol Jagung
(Rintisan)

6	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Pembuatan Briket Tongkol Jagung
	Investasi Usaha	
	Mesin Pembuat Briket	35.000.000,-
	Alat Pembakaran Briket	5.000.000,-
	Kapasitas Produksi	100 Kg/Jam
	Hasil Briket per 100 Kg Tongkol Jagung	20-30 Kg
	Mekanisme Produksi	
	Biaya Produksi	
	Harga Tongkol Jagung	500,-/Kg
	Upah Kerja	2.000,-/Kg
	Biaya Listrik	3.500,-/Kg
	Bahan Lainnya	1.800,-/Kg
	Total Biaya Produksi	6.800,-/Kg
	Penjualan	
	Harga Jual	10.000,-/Kg
	Selisih Biaya Produksi	3.200,-/Kg
	Estimasi Produksi Setiap Masa Panen	
	Tongkol Jagung yang dapat dijadikan Bahan Baku Setiap Masa Panen	500.000 Kg
	Briket yang dapat dihasilkan dari Total Bahan Baku Tersedia (20% dari Total Bahan Baku)	100.000 Kg
	Laba Kotor Penjualan Briket Per Masa Panen	32.000.000,-

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Mencermati hasil analisis anggaran pada Tabel 5.9, maka Modal Kerja yang dibutuhkan untuk Bahan Baku Pembelian Tongkol Jagung dari Petani yakni sebesar Rp.250.000.000,-. Tentunya biaya ini tidak serta merta dikeluarkan oleh BUMDes, karena dengan nilai ekonomis yang dimiliki Tongkol Jagung, dimana selama ini menjadi Limbah, maka Petani dapat menjadikan Penghasilan ini sebagai sarana untuk membiayai kegiatan lainnya seperti Penyewaan Mesin Perontok Jagung dan Pengadaan Bibit serta Pupuk.

Sirkulasi perputaran modal tersebut selain dapat memberikan kemudahan serta keuntungan bagi Petani, untuk BUMDes juga dapat memperoleh keuntungan dari Perputaran tersebut seperti Fee atau Bonus dari pihak Distributor Penjualan Bibit dan Pupuk, kemudian BUMDes dapat pula mendapatkan selisih harga jual dari Bibit atau Pupuk yang diadakan untuk petani.

7) Pengembangan Usaha Lainnya

Terdapat beberapa Potensi yang ada di Desa Cemba dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes, namun pengelolaannya dipertimbangkan setelah usaha lainnya telah berjalan dengan baik, usaha-usaha tersebut antara lain :

a) Unit Pertokoan

Unit Pertokoan ini dijadikan sebagai alternatif usaha karena sifat pengembangannya selain membutuhkan investasi cukup besar, juga pengelolaanya harus dilakukan secara teliti dan akurat, karena jenis barang yang akan dikelola cukup banyak. Walaupun usaha ini dapat mendukung potensi lainnya seperti pembuatan Sikapa, namun Beban Usaha yang dibutuhkan juga cukup tinggi,

Estimasi anggaran yang dibutuhkan pada usaha ini dapat diuraikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 5.10
Analisis Potensi Usaha Unit Pertokoan

7	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Unit Pertokoan
	Investasi Usaha	
	Ruko (Toko)	200.000.000,-
	Pembelian Barang	30.000.000,-
	Prediksi Perputaran Anggaran	
	Nilai Perputaran Barang	
	Nilai Perputaran Perminggu	20.000.000,-
	Estimasi Keuntungan Usaha Per Minggu	2.000.000,-
	Estimasi Keuntungan Usaha Setiap Buannya	8.000.000,-
	Prediksi Pembiayaan Per Bulan	
	Upah Karyawan (3 Orang)	3.000.000,-
	Biaya Listrik	500.000,-
	Beban Kerusakan Barang	400.000,-
	Estimasi Biaya dan Beban Perbulan	3.900.000,-
	Laba Kotor Usaha	4.100.000,-

Mencermati tingkat penghasilan yang diperoleh dari usaha ini pada dasarnya cukup besar, namun terdapat

beberapa pertimbangan sehingga dijadikan sebagai alternatif karena resiko usaha ini cukup besar dan juga membutuhkan pola penanganan yang baik.

b) Home Industry

Usaha dalam bentuk *Home Industry* adalah bentuk kegiatan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan mengolah potensi yang bersifat musiman seperti Sikapa.

Sasaran utama dari pengembangan usaha ini adalah memperkenalkan makanan Tradisional sekaligus sebagai sarana untuk menambah penghasilan dari masyarakat khususnya Ibu Rumah Tangga, Estimasi Biaya untuk Pengembangan Usaha ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.11
Analisis Potensi Usaha Pengelolaan Sikapa

8	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh Masyarakat	Home Industry
	Investasi Usaha	
	Peralatan	300.000,-
	Prediksi Perputaran Anggaran	
	Bahan Baku Utama Buah Sikapa	10.000,-/Kg
	Bahan Baku Pendukung	
	Plastik Pembungkus/100 Pcs	50.000,-
	Minyak Goreng	27.000,-
	Bumbu Penyedap	5.000,-/Kg
	Estimasi Olahan Sikapa Per Kg	
	Jumlah Produksi Keripik Per Kg Buah Sikapa	15 Bungkus
	Harga Jual Per Bungkus	5.000,-/Bungkus
	Estimasi Olahan Sikapa Per 100 Bungkus	
	Buah Sikapa (7 Kg)	70.000,-
	Minyak Goreng	27.000,-

Harga Plastik	50.000,-
Total Biaya Per 100 Bungkus	147.000,-
Estimasi Keuntungan	
Jumlah Produksi (7 Kg)	105 Bungkus
Harga Perbungkus	5.000,-
Nilai Penjualan	525.000,-
Laba Kotor Usaha	418.000,-

Optimalisasi terhadap usaha ini jika masyarakat mampu memanfaatkan jumlah Produksi Sikapa setiap Musim Kemarau, maka jumlahnya cukup besar, sebab Buah ini selain Tumbuh Liar juga tidak membutuhkan pemeliharaan secara khusus, dimana masyarakat hanya perlu memperluas lahan produksi.

c) Usaha Pembuatan Dangke

Dangke merupakan salah satu makanan tradisional berbahan dasar susu sapi, sehingga untuk dilakukan pengembangan usaha ini, diperlukan investasi dalam bentuk Pengadaan Sapi Perah kepada masyarakat.

Usaha ini sebenarnya telah menjadi salah satu target pengembangan usaha BUMDes dan akan dipadukan dengan Penggemukan Sapi, hanya saja pengelolaan usaha ini akan dilakukan setelah Penggemukan Sapi telah berjalan dengan baik, agar masyarakat dapat menjadikan Pembuatan Dangke sebagai Penghasilan Tambahan.

Estimasi Kebutuhan Anggaran untuk Pengelolaan Dangke ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.12
Analisis Potensi Usaha Pembuatan Dangke

10	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh Masyarakat	Pembuatan Dangke
	Investasi Usaha	
	Sapi Perah Per Ekor	10.000.000,-
	Kebutuhan Setiap Peternak (Minimal 2 Ekor)	20.000.000,-
	Prediksi Perputaran Anggaran	
	Biaya Pakan Per Hari (Biaya Bahan Bakar)	25.000,-/Hari
	Tambahan Pakan Utama	20.000,-/Hari
	Pembersihan Kandang	25.000,-/Hari
	Estimasi Biaya Perhari	70.000,-
	Prediksi Hasil Produksi	
	Produksi Susu Per Hari	10-15 Liter,-
	Jumlah Dangke per 10 Liter Susu	20 Biji
	Harga Dangke	20.000,-/Biji
	Total Harga Dangke per 10 Liter	400.000,-/Hari
	Biaya Produksi	
	Pembuatan Dangke	
	Biaya Produksi	150.000,-
	Biaya Pengelolaan Pakan dan Kandang	70.000,-
	Total Biaya Produksi	220.000-/Hari
	Estimasi Keuntungan	
	Jumlah Produksi (10 Liter Susu)	400.000,-
	Biaya Produksi	220.000,-
	Laba Kotor Per Minggu	1.220.000,-
	Laba Kotor Usaha Per Bulan	4.880.000,-
	Keuntungan BUMDes	
	Biaya Pengembalian 1 Ekor Sapi setiap Bulam	1.250.000,-
	Keuntungan Satu Tahun Setiap 1 Ekor Sapi	3.000.000,-

Kelebihan utama dari usaha ini, dimana peternak tidak membutuhkan biaya untuk penjualan, sebab tingkat permintaan akan kebutuhan Dangke saat ini masih sangat tinggi, dan pembeli biasanya berusaha untuk mencari sendiri peternak yang mengelola Dangke. Sementara Peran BUMDes dalam pengembangan

usaha ini adalah memberikan Investasi dalam bentuk Pembelian Sapi Perah untuk selanjutnya dikelola oleh Petani dengan sistem pengembalian dengan mencicil atau mengangsur harga sapi selama 1 Tahun

B. Pembahasan.

1. Pengembangan Usaha BUMDes Berbasis Potensi Desa

Pengelolaan BUMDes di setiap daerah pada dasarnya memiliki 3 (Tiga) bentuk modal dasar yang dapat dikembangkan, dimana modal-modal dasar tersebut menurut Muhammad Nashih Ulwan (2022) terdiri dari Modal Sosial, Modal Budaya dan Modal Ekonomi. Kesemua bentuk modal dasar pengelolaan BUMDes ini memiliki peran penting untuk menjaga kelangsungan usaha yang dikelola dan dikembangkan, sebab banyaknya usaha BUMDes akhirnya harus mandeg atau tidak aktif dikarenakan dari ketiga modal dasar ini, ada diantaranya tidak difungsikan.

Modal Sosial dan Modal Budaya seringkali tidak dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam pengelolaan BUMDes, dan bahkan terkadang dilupakan, sementara dari prinsip-prinsip dasar pendirian BUMDes kedua jenis modal ini justru menjadi sering disebutkan. Modal Sosial dan Modal Budaya adalah bagian dari Potensi yang dimiliki oleh sebuah Desa, olehnya itu Ika Fitriyani (2023) menegaskan bahwa pengembangan terhadap modal sosial dan juga modal budaya dapat menghindarkan BUMDes dari sikap

tidak peduli dari masyarakat, sehingga untuk pemanfaatan modal ini harus selalu menjadi bagian dalam pengelolaan BUMDes, sebab menjadi bagian dari pengembangan partisipasi masyarakat terhadap usaha-usaha yang dikelola BUMDes.

Desiwantara (2021) juga mengemukakan bahwa untuk dapat meningkatkan peran dari BUMDes, maka salah satu pendekatan yang mestinya dilakukan yakni melalui *Capital Partisipation of Community*, artinya pola pengembangan BUMDes semestinya selalu melibatkan unsur masyarakat dan semua bentuk sumber daya di desa sebagai bagian dari Modal Sosial dalam menggerakkan usaha yang akan dikembangkan BUMDes.

Sumber Daya dalam Modal Sosial dan juga tidak terlepas dari Modal Budaya tidak hanya berorientasi pada Sumber Daya Manusia namun juga pada semua bentuk sumber daya yang ada di desa, olehnya itu pendekatan awal dalam penelitian ini adalah melihat dan memetakan potensi yang ada di desa dengan pola pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa.

Langkah ini dianggap sangat penting karena menurut Miftahul Zannah Buhanga (2022) bahwa secara ekonomi modal dalam bentuk finansial akan menjadi tidak optimal jika tidak dapat dikelola dengan baik, dimana maksud pengelolaan disini adalah Modal akan memiliki nilai jika usaha yang akan dikelola dapat mendukung kegiatan dimasyarakat. Nur Cahyadi (2023) juga

menambahkan bahwa perputaran arus kas dalam sebuah usaha akan berjalan maksimal jika usaha yang dikelola oleh BUMDes memiliki keterikatan dengan keinginan masyarakat.

Berdasar pada konsep tersebut, maka dalam penelitian ini langkah awal yang dilakukan yakni melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi yang ada di Desa Cemba dengan mengacu pada informasi dari masyarakat, hal ini menjadi penting sebab yang memiliki pemahaman terhadap potensi atau sumber daya dengan nilai ekonomis tinggi adanya dimasyarakat, dan untuk usaha yang dapat dikembangkan pun dapat diperoleh dari harapan-harapan dari masyarakat.

Pentingnya langkah pemetaan dilakukan terhadap semua bentuk potensi yang ada di desa juga ditegaskan oleh Darmin Bone Hasirun (2020) bahwa permasalahan yang terjadi pada pengelolaan BUMDes diberbagai tempat, penyebab utamanya bukan karena faktor permodalan, akan tetapi permasalahan itu lebih dikarenakan BUMDes dalam menentukan usahanya tidak didasarkan atas rancangan usaha yang berorientasi pada aspirasi dan keinginan masyarakat berbasis potensi-potensi yang ada di sebuah desa.

Kondisi ini sangat jelas terlihat dari hasil pemetaan potensi-potensi yang ada di desa Cemba, dimana diperoleh gambaran dari hasil informasi masyarakat bahwa dari sekian banyak potensi

yang ada di desa cempa terdapat beberapa bentuk potensi dan sumber daya memiliki prospek untuk dijadikan sebagai usaha BUMDes, bahkan dari hasil analisis terhadap potensi-potensi itu disimpulkan bahwa kesemuanya jika dikembangkan menjadi usaha BUMDes dampaknya tidak hanya dirasakan oleh BUMDes dalam bentuk keuntungan, namun lebih daripada itu bentuk usaha dari potensi tersebut mampu mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.

2. Kebutuhan Modal Usaha BUMDes dan Pola Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Desa.

Modal usaha merupakan salah satu faktor terpenting dalam melakukan pengembangan usaha, sebab tanpa adanya modal maka sebuah usaha akan sulit berjalan, akan tetapi dalam hal pengembangan usaha BUMDes menurut Darmin Bone Hasirun (2020) bahwa persoalan modal akan menjadi tidak penting jika usaha yang akan dikembangkan tidak berbasis pada potensi dari sebuah wilayah atau desa. Hal ini tentunya didasarkan pada berbagai kondisi dimana sebuah BUMDes memiliki sumber modal memadai yang berasal dari Dana Desa, namun karena orientasi usaha yang dikembangkan tidak mampu memberikan dampak timbal balik kepada masyarakat, akhirnya menjadi mandeg.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Aminuddin (2022) bahwa modal memang menjadi salah satu variabel sangat penting dalam melakukan pengembangan usaha, namun peran

dari modal dapat menjadi kurang signifikan karena terdapat unsur atau variabel lain yang justru memiliki peran lebih penting, dan hal ini jika dikaitkan dengan pengelolaan BUMDes bahwa unsur penting tersebut yakni potensi yang dimiliki oleh desa seperti sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Sehingga dari permasalahan ini dapat dikatakan bahwa keberadaan modal jika tidak didukung dengan optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada di desa, maka perannya menjadi tidak signifikan.

Hasil analisis terhadap kebutuhan Modal dari rancangan usaha BUMDes menunjukkan bahwa beberapa usaha besaran modal yang dibutuhkan cukup signifikan seperti pada hasil analisis untuk pengelolaan usaha *Brokering*, dimana BUMDes berperan sebagai perantara dalam melakukan pembelian Jagung hasil panen dari Petani kemudian dijual kembali kepedagang. Usaha ini apabila ingin dikembangkan sesuai dengan unsur-unsur produksi didalamnya maka dibutuhkan besaran Modal khusus pembelian Jagung sebesar Rp,3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).

Tentunya jumlah ini menjadi sangat signifikan, walaupun Rama Yana (2023) mengemukakan bahwa semakin besar modal yang diinvestasikan maka semakin besar pula peluang usaha untuk berkembang, namun konsep ini tentunya juga memerlukan pencermatan lebih jauh apabila dihubungkan dengan kebutuhan usaha yang akan dikembangkan BUMDes khususnya pada bidang

usaha *Brokering* ini, sebab tingkat kemampuan keuangan dari sebuah Desa untuk dapat memberikan investasi pada BUMDes hanya berkisar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

Menyikapi kondisi tersebut tidak berarti usaha BUMDes tidak dapat dikembangkan, akan tetapi diperlukan langkah bijak untuk hal tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Nurul Fajrianti (2020) bahwa kebutuhan modal suatu BUMDes dapat disesuaikan dengan perkembangan usahanya, artinya prospek dari proses jual beli jagung hasil petani tidak mesti harus dilakukan secara tuntas, namun dapat disesuaikan dengan kondisi panen dari petani. Karena waktu panen yang dilakukan oleh petani tentunya tidak seragam, dengan itu maka proses pembelian dapat dilakukan secara bertahap.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan agar kebutuhan Modal BUMDes dapat terpenuhi yakni dengan mengoptimalkan hasil usaha atau pendapatan yang diperoleh, dimana menurut Ismi Dwi Kurniasih (2021) bahwa penggunaan modal dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan pendapatan yang diperoleh untuk kembali dijadikan sebagai modal usaha. Selain itu menurut Nur Cahyadi (2023) pemenuhan terhadap modal usaha BUMDes dapat pula dipenuhi dengan memperhatikan arus kas, sebab semakin lancar arus kas, maka modal usaha juga dapat ditingkatkan, olehnya otpimalisasi pengelolaan usaha harus menjadi perhatian.

Mencermati analisis kebutuhan modal dan juga tingkat perputaran modal pada beberapa bentuk usaha yang diusulkan untuk dikelola dan dikembangkan BUMDes, maka terdapat dua jenis usaha dengan jumlah investasi tidak terlalu besar, namun perputaran modalnya sangat lancar yakni usaha penyewaan Mesin Perontok Jagung, dimana dengan jumlah sewa sebesar Rp.50,000,-/Ton jika dibandingkan kapasitas produksi yang ada di Desa Cemba dan juga daerah-daerah sekitarnya, maka usaha ini dapat memberikan subsidi cukup besar pada perputaran modal dari BUMDes.

Usaha lainnya yang juga dianggap dapat memberikan subsidi cukup besar yakni usaha Pengelolaan Briket Arang dari Tongkol Jagung, dimana usaha ini nilai investasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar, akan tetapi hasilnya cukup besar. Hanya saja kendala utama jika usaha Briket dari Tongkol Jagung ini akan dikembangkan oleh BUMDes, maka proses pengenalan serta pemanfaatannya perlu lebih dioptimalkan.

Terdapat pula usaha yang sifat pengelolaannya berupa investasi, namun jangka waktu dari masa investasi tersebut berkisar 1 (Satu) Tahun, namun hasil yang diperoleh juga cukup besar dimana usaha ini bergerak dalam bidang penggemukan sapi, akan tetapi untuk menghitung masa investasi tersebut harus dilakukan secara cermat, karena masa penjualan terbesar adanya

pada hari raya Idul Qurban, artinya BUMDes jika akan melakukan investasi harus menghitung masa pemeliharaan dengan waktu dimana penjualan Sapi dalam jumlah besar akan dilakukan, sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh.

Melalui analisis anggaran yang telah dilakukan, setidaknya BUMDes dan Pemerintah Desa telah memiliki acuan terhadap usaha yang akan dikembangkan, apakah secara bertahap untuk usaha dengan kebutuhan modal cukup besar atau memilih usaha dengan investasi yang tidak terlalu besar, untuk menjadi modal awal untuk usaha lainnya. Artinya dengan adanya analisis anggaran terhadap semua usaha yang dianggap memiliki prospek dan berorientasi pada potensi sumber daya di desa, maka pilihan diberikan kepada BUMDes untuk mengembangkannya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Analisis Kebutuhan Modal BUMDes Madalleng Terhadap Pengembangan Potensi Desa Cemba Kabupaten Enrekang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Pemetaan terhadap Potensi yang ada di desa Cemba diperoleh gambaran bahwa terdapat berbagai Potensi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam Pengembangan BUMDes, baik itu Potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Hasil Pemetaan terhadap Potensi yang ada di Desa Cemba setelah dilakukan pencermatan terdapat 6 Jenis Usaha dianggap Potensi untuk dikembangkan oleh BUMDes.
2. Analisis terhadap Kebutuhan Modal Usaha terhadap jenis-jenis yang dianggap potensial untuk dikembangkan oleh BUMDes, pola pendekatannya tidak semata-mata beorientasi pada keuntungan, namun lebih diupayakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga untuk analisis kebutuhan yang disusun selain memuat tentang kebutuhan anggaran usaha juga dibuat estimasi tentang peluang yang diperoleh masyarakat jika usaha tersebut berjalan, Hal ini dimaksudkan agar tingkat partisipasi masyarakat menjadi lebih baik.

B. Saran-saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Cemba dalam rangka Analisis Kebutuhan Modal BUMDes Madalleng Terhadap Pengembangan Potensi Desa Cemba Kabupaten Enrekang yakni :

1. Pemerintah Desa diharapkan dalam Pengembangan Usaha yang akan dikelola oleh BUMDes, sifat penetapannya selalu berdasar pada aspirasi dari masyarakat, olehnya usulan, harapan dan jenis usaha yang akan dikembangkan seharusnya ditetapkan melalui forum desa.
2. Pemerintah Desa diharapkan mampu memberi dukungan terhadap Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes, melihat Analisis Kebutuhan Modal yang telah disusun peluang dalam memperoleh Penghasilan Asli Desa (PADes) cukup besar dan juga menjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Edi dan Librita Arifiani. 2022. Panduan Praktif Teknik Penelitian Yang Beretika: Konsep, Teknik, Aplikasi Metode Penelitian & Publikasi. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Abdussamad, Z. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press
- Abdul Rahmad Suleman, dkk. 2020. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Jakarta : Yayasan Kita Menulis
- Agus, S Irfani. 2020. Manajemen Keuangan Dan Bisnis : Teori Dan Aplikasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Akhmad Syarifudin dan Susi Astuti, 2020. Strategi Pengembangan BUMDes dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Pendekatan Social Entrepreneur di Kabupaten Kebumen. Jurnal Research Fair Unisri 2019 Vol 4, Number 1, Januari 2020.
- Ahyar, H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group
- Aisyatun Nafisah, 2023. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Akhmad Syarifudin dan Susi Astuti, 2020. Strategi Pengembangan BUMDes dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Pendekatan Social Entrepreneur di Kabupaten Kebumen. Jurnal Research Fair Unisri 2019 Vol 4, Number 1, Januari 2020
- Aminuddin, Evi Malia, Hanafi, Nailah Aka Kusuma. 2022. Pengaruh Besaran Modal Awal Terhadap Eksistensi BUMDes di Kabupaten Sumenep. Jurnal Wiraraja, Vol. 3 No (1).
- Ansahar, dkk 2023. Pengembangan Desa Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa. Bintang Semesta Media.
- bumdes.id, 2021. Resolusi BUMDes 2014-2021. BUMDes Update Nomor 101/2021 Januari 2021.
<https://blog.bumdes.id/wp-content/uploads/2021/01/Bumdes-Update-101-Resolusi-Bumdes-2021.pdf>
- Darmin Bone Hasirun, 2020. Optimalisasi Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan).

Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 3 No. 1 Bulan April 2020

Desiwantara, Khasan Effendy, Udaya Madjid, Megandaru W. Kawuryan, 2021. Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jurnal Inovasi Volume 7 Nomor 4, Tahun 2021; Hal : 850-859

Dwipayanti, N., dan Kartika. 2020 Pengaruh Modal, Pengalaman Kerja dan Lama Usaha Terhadap Produktivitas Serta Pendapatan BUMDes di Kabupaten Badung. Universitas Udayana : E-jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No (2), Hal : 354-382.

Ermaini, Suryani, A. I., Sari, M. I., & Hafidzi, A. H. 2021. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Samudra Biru.

Hafiziah Nazira Putri, Sopyan Resmana, Haura Atthahara, Lina Aryani, 2022. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi (Studi di Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, July 2022, 8 (10), 353-358

Harahap, Sofyan Syafri. 2020. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan (1-10 ed.). Jakarta: Rajawali Press.

Harahap, Nursapiah. 2020. Penelitian Kualitatif. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri Publishing.

Hasanah Dkk, 2021. Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Jakarta: UM Jakarta Press

Hermi Bafa, Teguh Erawati, Anita Primastiwi. 2021. Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 3 Nomor 2 September 2021

Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, 2019. Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia, Jakarta: PT Grasindo

Ika Fitriyani, Muhammad Nur Fietroh, 2023. Keberadaan BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. Jurnal Cafetaria Vol. 4 No. 1 (Januari, 2023) Hal : 72-78

Ismi Dwi Kurniasih, 2021. Pengaruh Modal Dan Omset Terhadap Pendapatan BUMDes Di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Nahdatul Ulama Al-Ghazali Cilacap

- Jenita dan Herispon. 2022. Manajemen Keuangan Perusahaan. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka.
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. 2020. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. Jurnal Pemerintah Desa , Vol 1. Hal 34-44
- Lexy Febrison Malani, Selvie M. Tumengkol, Juliana Lumintang. 2021. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Holistik Vol. 14 No. 1 / Januari – Maret 2021
- Maharani, Setyowati dan Puspitadewi. 2020. Pengaruh Modal, Perputaran Kas dan Pertumbuhan Tabungan pada Profitabilitas BUMDes Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Jurnal Kirana, Vol. 2 No (1) Tahun 2020
- Miftahul Zannah Buhanga, Rio Monoarfan, Lukman Pakaya, 2022. Analisis Modal Kerja dalam Peningkatan Laba Usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bolugo di Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Volume 1 No. 3 Desember 2022 Hal. 154-168
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2018. Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.
- Muhammad Nashih Ulwan, 2022. Modal Sosial Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Murdiyanto, Eko. 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press
- Nabila Sufah, Hasrul, Suryanef, Henni Muchtar, 2023. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. JECCO : Journal of Education, Cultural and Politics Volume 3 No 1 2023
- Nurul Fajrianti, 2020. Analisis Kebutuhan Modal Kerja Terhadap Laba Usaha Pada BUMDes Mattuju Di Desa Pitue Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Skripsi : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makasar
- Nur Cahyadi, Alif Sulthon Basyari. 2023. Strategi Pengembangan BUMDes Melalui Optimalisasi Lahan Desa Sebagai Bentuk

Upaya Peningkatan Pendapatan. DedikasiMU (Journal of Community Service) Volume 5, Nomor 2, Juni 2023

Pardosi, Lucita Melati, 2022, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Repository Universitas HKBP Nommensen Medan

<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6019>

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa

Rama Yana, 2023. Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan BUMDes Sumber Rezeki Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Skripsi : Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Resty Ditha Handayani, Arie Apriadi Nugraha. 2023. Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa Indonesian Accounting Research Journal Vol. 3, No. 3, June 2023, pp. 270 – 280

Sihabudin, 2021. Konsep, Analisis, dan Tinjauan Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

Sinta Rahmawati, 2022. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Puskasagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Universitas Galuh (Unigal) Repository Volume 02 Nomor 01, Maret 2022

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Sujarweni, V. Wiratna. 2020. "Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)". Pustaka Baru Press: Yoyakarta

Tatang Sujana, Zakiyudin Fikri, 2023. Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio), Vol. 5, No. 2, Juli 2023

Tatik Mulyati, Hendro Susilo, Ahadiati Rohmatiah, Anik Tri Haryani. 2022. Membangun Desa Wisata Sinergi Antara Potensi & Pemberdayaan. Lakeisha. Klaten, Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa